

**ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN KURSI PARTAI ACEH DI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILU  
LEGISLATIF TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Oleh:

**HAFIJAL**

**NIM. 140801028**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN KURSI PARTAI ACEH DI  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**HAFIJAL**  
**NIM. 140801028**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

**Pembimbing I** **A R - R A N I R Y** **Pembimbing II**

  
**Dr. Abdullah Sani, MA**  
**NIP. 196407051996031003**

  
**Eka Januar, M.Soc.Sc**  
**NIP. 198401012015031003**

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :  
HAFIJAL  
NIM. 140801028

Pada hari / Tanggal  
Selasa : 04 Agustus 2020  
14 Dzul-Hijjah 1441

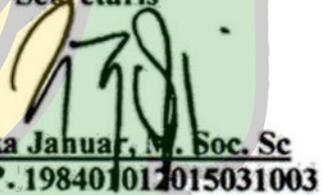
Di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

  
Dr. Abdullah Sani, MA  
NIP. 196407051996031003

Sekretaris

  
Eka Januar, M. Soc. Sc  
NIP. 198401012015031003

Penguji I

  
Muhammad Thalal, Lc, M.Si,  
NIP. 19027206212003121002

Penguji II

  
Ramzi Murziqin, MA  
NIP. 1986051320190310061

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafijal  
NIM : 140801028  
Program Studi : Ilmu Politik  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karia atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/di batalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Hafijal

NIM.140801028

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Analisis Penurunan Perolehan Kursi Partai Ace di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019**. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, harus disadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu dengan tulisan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda M.Said dan Ibunda Siti Hawa, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa Bapak dan Ibu selama ini. Lantunan doa menjadi penyemangat ananda dalam menyelesaikan studi, semoga skripsi ini sedikit banyaknya bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk Abang dan Kakak tercinta Amnasir, Safwan, Safrida, Irawati, Putra Fahmi yang sudah mendukung secara materi dan non materil dalam proses menyelesaikan studi ini.
2. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M. Ag., M. Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Adhe Irma, B.H, Sc, M.A selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang terus memberikan semangat dan motivasi untuk segera meraih titel Sarjana
5. Bapak Dr. Abdullah Sani Lc. MA. selaku ketua Program Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah membantu penulis dalam merampungkan tugas akhir ini, penulis sadar begitu banyak ilmu yang penulis dapatkan melalui bimbingan beliau.
6. Bapak Eka Januar, M.Soc, SC selaku dosen pembimbing kedua yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi dan mendapatkan segera meraih titel sarjana. penulis akui

banyak sekali bimbingan dan arahan dari beliau sehingga mengantarkan penulis sampai pada tahap ini.

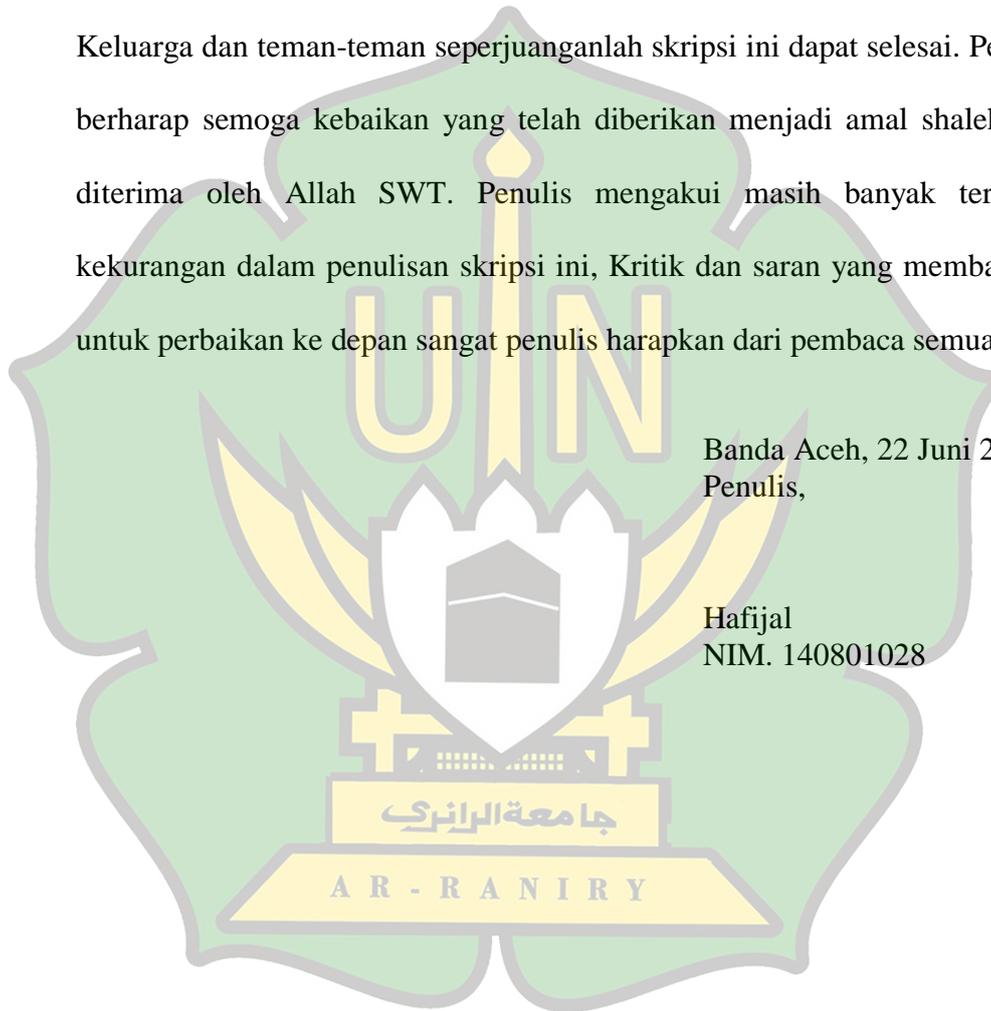
7. Terimakasih juga kepada Bapak Muhammad Thalal, Lc, M.Si dan Bapak Ramzi Murziqin, MA yang bertindak menjadi penguji pada sidang munaqasyah penulis. Dan banyak masukan dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
9. Terimakasih Kepada Teman-teman dari Hipelmabda yang telah memberikan support kepada penulis dengan selalu menanyakan kapan wisuda. Terimakasih juga kepada Dema Fisip Uin Ar-Raniry dan IPPELMAKUBA yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu organisasi selama menempuh Pendidikan tinggi di Prodi Ilmu Politik, Fisip Uin Ar-Raniry.
10. Terimakasih juga kepada Sukma Nuria Vikra S.Ag yang selama ini selalu memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi, serta selalu menemani penulis di masa-masa sulit, dari awal pengajuan judul, penulisan proposal skripsi sampai ke penelitian, penulis sadar tanpa adanya dukungan dan motivasi dari banyak pihak skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu.
11. Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu perlu adanya kritik, masukan dan saran

dari semua pihak untuk pebaikan di kemudian hari. Terimakasih kepada semuanya, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Hanya dengan iringan do'a dan motivasi dari kedua orang tua, Keluarga dan teman-teman seperjuanganlah skripsi ini dapat selesai. Penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan sangat penulis harapkan dari pembaca semuanya.

Banda Aceh, 22 Juni 2020  
Penulis,

Hafijal  
NIM. 140801028



## DAFTAR TABEL

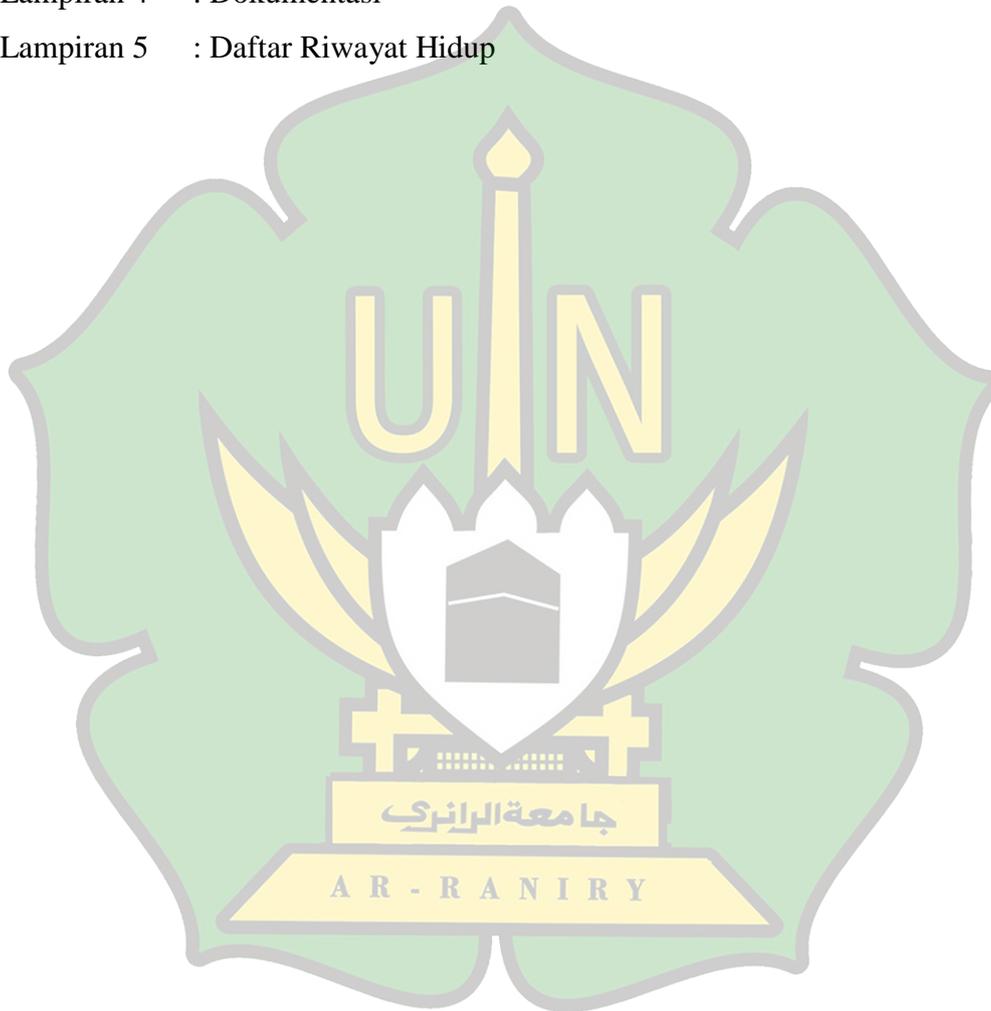
## Halaman

Tabel 1.1 Pendekatan pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955-2019 .....	5
Tabel 1.2 Perolehan suara dan Kursi Partai Aceh pada Pemilu Legislatif tahun 2009, 2014, dan 2019 .....	6
Tabel 1.3 Anggota DPRK Aceh Barat Daya dari tahun 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024 .....	7
Tabel 4.1. Perolehan suara Partai dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya .....	42
Tabel 4.2. Perolehan suara Partai Aceh dari tiap Dapil dan Perolehan Kursi pada Pemilu Legislatif 2019 .....	43
Tabel 4.3. Daftar Calon Anggota Legislatif Terpilih Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK (Surat Keputusan) Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR SINGKATAN

1. DPRK : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
2. DPRA : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3. PA : Partai Aceh
4. DPW : Dewan Pengurus Wilayah
5. DPA-PA : Dewan Pengurus Aceh Partai Aceh
6. KPA : Komite Peralihan Aceh
7. GAM : Gerakan Aceh Merdeka
8. MOU : Memorandum of Understanding
9. KIP : Komisi Independen
10. PNA : Partai Nangroe Aceh
11. PDA : Partai Daerah Aceh
12. SIRA : Suara Independen Rakyat
13. CALEG : Calon Anggota Legislatif
14. PILKADA : Pemilihan Kepala Dearah
15. PEMILU : Pemilihan Umum



## ABSTRAK

Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu semenjak pertama keikutsertaannya. Partai Aceh menang pada pemilihan legislatif tahun 2009 di Kabupaten Aceh Barat Daya dan kembali berhasil mengulanginya pada tahun 2014, serta partai pemenang Pilkada pada tahun 2012. tahun 2009 Partai Aceh berhasil mendapatkan 9 kursi dari 25 kursi yang tersedia dan pada tahun 2014 berhasil memperoleh 7 kursi, dan pada tahun 2012 berhasil menempatkan kadernya sebagai Bupati, namun pada pemilihan legislatif tahun 2019 hanya meraih 3 kursi, dan total suara Partai juga turun keurutan ketiga sehingga harus kehilangan posisi Ketua DPRK yang sudah dalam genggamannya selama 2 periode. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan berupa wawancara dan kajian kepustakaan. Teknik analisis data diawali dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan penyebab menurunnya perolehan kursi Partai Aceh pada pemilihan legislatif tahun 2019 di karenakan perpecahan elit, Kehilangan kepercayaan masyarakat, Perubahan perilaku pemilih, dan rendahnya elektabilitas calon legislatif yang diusung, sehingga menyebabkan Partai Aceh mengalami penurunan suara yang sangat drastis jika dibandingkan dengan pemilihan periode sebelumnya. Adapun tantangan yang di hadapi oleh calon anggota legislatif dari Partai Aceh adanya perubahan perilaku pemilih dan persepsi terhadap Partai Aceh dengan semakin berpengalamannya masyarakat mengikuti pemilu ditambah lagi konflik antar elit partai yang belum terselesaikan dengan baik membuat simpatisan di akar rumput kocar-kacir, akibatnya caleg dan sayap partai aceh kesulitan meyakinkan masyarakat selaku pemilih. Dari penelitian ini dapat di tarik kesimpulan penurunan perolehan kursi partai aceh di sebabkan oleh faktor internal partai dan faktor eksternal masyarakat.

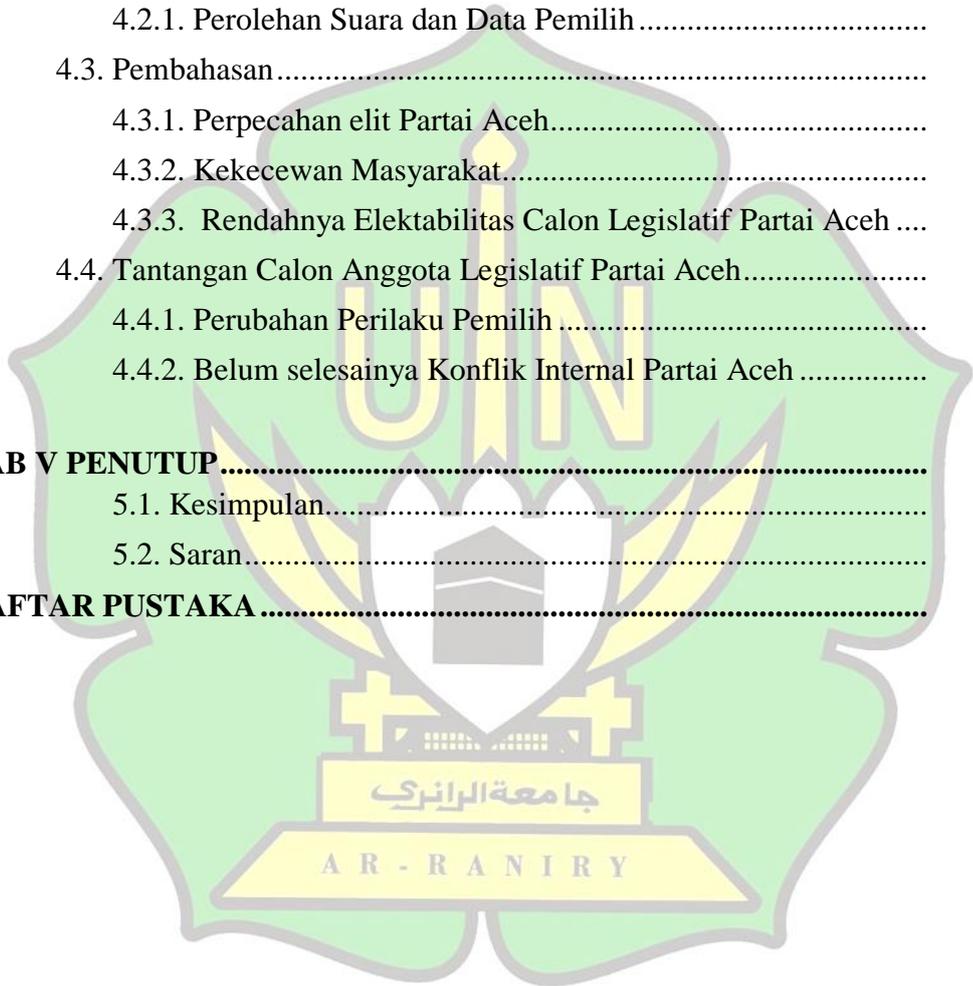
**Kata Kunci:** Partai Aceh, Penurunan Perolehan Kursi, Pemilihan Legislatif 2019, Aceh Barat Daya

AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KAMUS ISTILAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Pengertian Partai Politik dan Partai Politik Lokal.....	11
2.1.1. Pengertian partai politik .....	11
2.1.2. Pengertian partai politik lokal .....	13
2.1.3. Partai politik lokal di Aceh.....	15
2.2. Strategi Politik.....	17
2.2.1. Jenis Strategi Politik.....	18
2.3. Perilaku Pemilih .....	22
2.3.1 Model Sosiologis.....	23
2.3.2 Model Pilihan Rasional .....	24
2.3.3 Model Psikologis.....	24
2.4. Teori Konflik Elite .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1. Metode Penelitian.....	28
3.2. Lokasi Penelitian .....	29
3.3. Jenis Penelitian.....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	34
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.2. Sejarah Berdirinya Partai Aceh .....	36
4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Partai Aceh .....	37
4.2. Deskripsi Temuan Penelitian .....	38
4.2.1. Perolehan Suara dan Data Pemilih .....	38
4.3. Pembahasan .....	42
4.3.1. Perpecahan elit Partai Aceh .....	42
4.3.2. Kekecewan Masyarakat .....	46
4.3.3. Rendahnya Elektabilitas Calon Legislatif Partai Aceh ....	48
4.4. Tantangan Calon Anggota Legislatif Partai Aceh .....	52
4.4.1. Perubahan Perilaku Pemilih .....	52
4.4.2. Belum selesainya Konflik Internal Partai Aceh .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Partai Politik merupakan kumpulan sekelompok orang yang terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat melalui pemilu. Partai politik merupakan prasyarat kelengkapan dalam suatu Negara demokratis, di Negara yan dikuasi oleh rezim non-demokratis peranan partai politik juga diakui, minimal dengan keberadaanya secara fisik<sup>1</sup>. Partai Politik berdiri atas kesamaan cita-cita dan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, Partai Politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan politik untuk meraih kekuasaan semata. Tapi lebih dari itu partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam dunia demokrasi. Karena setiab kebijakan politik di tentukan oleh kader-kader partai politik yang menduduki jabatan politis.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia wujud demokrasi dapat dilihat melalui pelaksanaan pemilihan umum. Rakyat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jabatan-jabatan tertentu di bidang eksekutif dan legislatif. Rakyat memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihan individu mana yang diberikan kepercayaan untuk menyuarakan aspirasi atau memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak melalui jalur eksekutif maupun legislatif. Oleh sebab itu partai politik yang tidak mampu menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tak jarang kehilangan pemilih di

---

<sup>1</sup>Deden Faturhman, Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, ( UMM Press:Malang, 2004), hal.269-273

pemilihan selanjutnya. Karena eksistensi partai politik tidak terlepas dari peran dan fungsinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Nota kesepahaman antara GAM dan RI yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Menandakan kilas baru sejarah perpolitikan di Aceh, Aceh menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang diberikan izin mendirikan partai politik lokal<sup>2</sup>. Partai politik lokal atau yang biasa disingkat dengan parlok adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang menetap di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya<sup>3</sup>. Minimal 50 orang Penduduk Aceh yang telah berusia 21 tahun, dan berdomisili tetap di Aceh sudah dapat membentuk partai lokal, hal itu merupakan salah satu poin kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>4</sup>

Secara konstitusional pembentukan Partai lokal adalah untuk merawat spirit perdamaian dan menumbuhkan semangat Demokrasi di Aceh, menurut beberapa sumber, Tujuan awal di bentuknya partai politik lokal memang secara khusus untuk menjaga perdamaian pasca MOU Helsinki. secara khusus diharapkan pasca dibentuknya partai Lokal di Aceh dapat menjadi alat perjuangan tanpa berperangan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh. Partai Politik Lokal diharapkan menjadi sarana baru Eks Kombatan Gam dan bagi masyarakat Aceh secara umum untuk memperjuangkan kekhususan

---

<sup>2</sup>Feisal Akbar , Eksistensi partai politik lokal di Aceh, *JIM FISIP Unsyiah*, Volume 2, Nomor 2:230-247 Juli 2017

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik lokal di Aceh

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Aceh yang telah dicapai melalui kesepakatan Mou dan menjadi kendaraan politik dalam proses kontestasi Demokrasi yang berlangsung di Aceh

Salah satu penyebab tercapainya kesepakatan perdamaian dalam MOU Helsinki antara Gam dengan Pemerintah Indonesia adalah persetujuan pemerintah Indonesia untuk mendirikan partai lokal di Aceh. Konsesi tersebut tidak pernah dibicarakan dalam perundingan-perundingan yang berlangsung sebelumnya, sehingga mengakibatkan perundingan selalu menemui jalan buntu. Dengan diperbolehkannya Masyarakat Aceh mendirikan partai lokal, maka akibatnya pada Pemilu Legislatif 2009. Diikuti oleh 6 partai politik lokal. Yaitu, PAAS, PDA, SIRA, PRA, PA, dan PBA. Dengan partai aceh berhasil memperoleh suara 48% kursi di DPRA (33 dari 69 kursi) dan 54% kursi di DPRK( (legislatif kabupaten/kota) di seluruh Aceh.

Partai Aceh adalah salah satu partai lokal di Aceh yang menjadi tempat bernaung dan kendaraan politik bagi eks kombatan Gam yang di ketuai oleh Muzakir Manaf, Partai Aceh dianggap sebagai sarana perjuangan tanpa senjata bagi eks kombatan. Serta berperan penting dalam melanjutkan kesinambungan perdamaian<sup>5</sup>. Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang mendominasi dalam kancah perpolitikan yang ada di Aceh<sup>6</sup>. Persaingan antar partai politik dalam merebut hati masyarakat tentunya menjadi warna tersendiri dalam dunia demokrasi, partai politik yang tidak mampu menempatkan diri dengan gagasan-gagasan dan figur politisi yang mampu memberikan garansi kepada masyarakat

---

<sup>5</sup>Darmansyah Djumala, *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 218-221

<sup>6</sup>Acehtrend.com, *Partai Gam cikal bakal Partai Aceh*, <https://www.acehtrend.com/2017/07/19-partai-gam-cikal-bakal-partai-aceh>, (di akses pada tanggal 15 Mei)

tak jarang tidak bertahan lama. Karena masyarakat yang akan sangat menentukan menang atau tidaknya partai politik dalam satu pemilihan.

Setelah Berjaya dalam dua kali Pemilu di Aceh, dominasi Partai Aceh mulai meredup pada Pemilu 2019. Perolehan Kursi Partai Aceh jauh menurun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bisa dikatakan ini merupakan pencapaian terburuk bagi Partai Aceh semenjak pertama kali mengikuti Pemilu pada Tahun 2009 yang lalu. Banyak pengamat mengungkapkan faktor-faktor mengapa Kursi Partai Aceh di DPRA menurun dan berkurang karena banyak kader potensial mereka maju sebagai Caleg untuk DPR RI, selain itu berkurangnya Kursi Partai Aceh di DPRK di Kabupaten/Kota, dikarenakan calon anggota legislatif dari Partai Aceh banyak pendatang baru dan bukan kader potensial sehingga kurang memiliki daya jual di hadapan masyarakat, secara Matematis dan Politis hal tersebut tentu saja merugikan internal Partai Aceh.<sup>7</sup>

Namun peneliti beranggapan apa yang disampaikan oleh pengamat-pengamat perlu pembuktian secara akademisi dan ilmiah, karena Disamping faktor diatas, tentu ada faktor lain yang menyebabkan berkurangnya perolehan kursi partai Aceh secara signifikan. Apalagi di kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi objek penelitian peneliti. Pemilihan Legislatif 2019 telah selesai dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Presiden pada tanggal 17 April yang lalu.

---

<sup>7</sup>Kumparan, *Senjakala Partai Aceh*, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/acehkini/senjakala/partai-aceh-1rQAivcmgb>. (di akses pada tanggal 15 Mei 2019)

**Tabel 1.1 Pendekatan pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955-2019**

No	Tahun Pemilu	Landasan Hukum	Jumlah Partai Politik
1	1955	UUDS 1950 UU No.07/1953	172
2	1971	UU No.15/1969	10
3	1977	UU No. 4/1975	3
4	1982	UU No. 4/1978 UU No. 2/1980	3
5	1987	UU No. 1/1985 UU No. 3/1985	3
6	1992	UU No. 2/1985	
7	1997	UU No. 2/1985	3
8	1999	UU No. 3/1999 UU No. 2/1999	48
9	2004	UU No. 4/2000 UU No. 12/2003 UU No. 23/2003	24
10	2009	UU No. 10/2008 UU No. 22/2007 UU No. 2/2008	38 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal
11	2014	UU No. 2/2011 UU No. 15/2011 UU No. 8/2012	12 Partai Nasional dan 3 Partai Lokal
12	2019	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	16 Partai Nasional dan 4 Partai Lokal

**Sumber: Imam Hidajat, 2012:190 dan diolah dari Website KPU**

Dari hasil pleno dan Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 Partai Aceh hanya berhasil mendapatkan 3 Kursi. ini merupakan perolehan paling rendah bagi Partai Aceh dalam beberapa kali keikutsertaannya pada kontestasi Pemilihan Legislatif sejak terbentuk, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja, ada sebab kenapa Partai Aceh mengalami penurunan perolehan suara dan kursi yang sangat signifikan.

berikut data perolehan kursi Legislatif dan suara Partai Aceh tahun 2009, 2014, dan 2019.

**Tabel 1.2 Perolehan suara dan Kursi Partai Aceh pada Pemilu Legislatif tahun 2009, 2014, dan 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Daftar Pemilih Tetap</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>Perolehan Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
2009	63,712	20,002	9	Ketua DPRK
2014	70,291	16,833	7	Ketua DPRK
2019	97,681	9,372	3	Wakil II

**Diolah dari Data Kip Aceh Barat Daya**

Dapat dilihat dari tiga kali pelaksanaan pemilihan legislatif, pada tahun 2019 Partai Aceh kehilangan posisi Ketua DPRK. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan pencapaian Partai Aceh yang pada pemilihan legislatif tahun 2009 memperoleh 9 kursi, dan mendapatkan posisi Ketua DPRK. Serta pada pemilihan legislatif tahun 2014 memperoleh 7 kursi dan bisa mempertahankan posisi Ketua DPRK, sementara itu perolehan suara Partai Aceh secara keseluruhan juga turun ke urutan tiga setelah partai Demokrat dan PNA, padahal pada Pemilu Legislatif sebelumnya Partai Aceh selalu meraih suara partai yang paling tinggi di bandingkan dengan partai yang lain<sup>8</sup>, hal ini merupakan fenomena menarik bagi peneliti untuk diteliti karena suara partai Aceh dari setiap pelaksanaan pemilihan mengalami penurunan yang sangat drastis.

<sup>8</sup>Kip Kabupaten Aceh Barat Daya

Dari uraian diatas penulis tertarik ingin meneliti penurunan perolehan kursi Partai Aceh, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis lebih lanjut mengenai *Penurunan Perolehan Kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019*.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Aceh Barat Daya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019?
2. Apa saja tantangan yang di hadapi oleh calon anggota legislatif dari Partai Aceh pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilu legislatif tahun 2019
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang di hadapi oleh calon anggota legislatif dari Partai Aceh pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu politik serta melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah mengenai *“Analisis Penurunan Perolehan Kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019*
2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan masukan untuk para elite partai Aceh untuk evaluasi internal dan semua pihak untuk tidak mendiskreditkan Partai Aceh dikarenakan penurunan perolehan kursi Partai Aceh dalam Pemilu 2019.

#### 1.5. Kajian Pustaka

##### Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun peneliti terdahulu tersebut adalah:

Mohd Tasar dalam penelitiannya yang berjudul *kekalahan Partai Aceh pada pemilu legislatif 2014* mengungkapkan kelemahan yang menjadi penyebab kekalahan Partai Aceh, dalam penelitiannya Mohd Tasar berpendapat kekalahan Partai Aceh disebabkan oleh dua faktor, yaitu Faktor Internal Partai dan faktor external. faktor internal adalah lemahnya kinerja kader partai, dan kurang solidnya

kader dalam mendukung kandidat yang diusung. Sedangkan faktor external adalah rakyat ingin perubahan, rakyat berkeinginan calon yang di usung dalam Pemilu legislatif adalah wajah-wajah baru yang lebih bisa diandalkan dan bersemangatkan jiwa muda serta mampu membawa perubahan.<sup>9</sup>

Dian Maulana dalam skripsinya yang berjudul penyebab menurunnya suara partai Demokrat pada Pemilu legislatif 2014 di Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwasanya penurunan suara partai Demokrat dikarenakan faktor tokoh partai dan figur calon legislatif yang diusung partai Demokrat, hadirnya partai-partai baru, kasus korupsi yang dilakukan oleh kader partai demokrat di pusat ditambah dengan pemberitaan di media menyebabkan citra partai demokrat buruk di mata masyarakat. sehingga eksistensi partai demokrat menurun.<sup>10</sup>

Raihan Yuranda dalam skripsinya yang berjudul kekalahan partai damai aceh sebagai partai berbasis ulama pada pemilu legislatif 2014 di kecamatan peukan bada kabupaten Aceh Besar. Kekuatan Partai Damai Aceh pada pemilu legislatif 2014 di Kecamatan Peukan Bada hanya mengandalkan basis massa dari kalangan dayah. Ada beberapa kelemahan Partai Damai Aceh sehingga mengakibatkan kekalahan dalam Pemilihan Legislatif 2014. Calon legislatif yang diusung oleh partai Damai Aceh kurang dikenal oleh masyarakat Kecamatan Peukan bada, Partai Damai Aceh tidak memiliki modal social yang kuat di kalangan masyarakat Peukan Bada, kekurangan dana dalam melakukan sosialisasi

---

<sup>9</sup>Mohd Tasar, Kekalahan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2014, *Lentera*, Vol.15 No.15.November 2015.

<sup>10</sup>Dian Maulana "penyebab menurunnya suara partai Demokrat pada Pemilu legislatif 2014 di Kota Banda Aceh" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsyiah, Banda Aceh, 2016.

kepada masyarakat peukan bada, kekurangan SDM, dan caleg yang diusung tidak melakukan kampanye langsung kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Muh.Ikramullah dalam penelitiannya yang berjudul Kekalahan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Aceh pada Pemilu legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014 mengungkapkan berdasarkan hasil Pemilu legislatif di Kota Banda Aceh tahun 2014, dari 12 nama calon anggota legislatif perempuan dari Partai Aceh, tidak satu pun terpilih atau menang pada pemilu legislatif tersebut. Hal ini disebabkan beberapa hal. *Pertama* kurangnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan, kurang dikenalnya calon legislatif perempuan tersebut dimasyarakat dan kurangnya perhatian partai terhadap calon legislatif perempuan. *Kedua* faktor figur dan budaya politik di masyarakat Kota Banda Aceh juga sangat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat kota Banda Aceh terhadap calon legislatif perempuan dari Partai Aceh.<sup>12</sup>

Dari beberapa literatur review yang penulis teliti, penulis belum menemukan adanya pembahasan yang rinci dan mendetail yang membahas tentang penyebab kekalahan dan penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilu legislatif 2019, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai masalah tersebut.

---

<sup>11</sup>Raihan Yuranda “kekalahan partai damai aceh sebagai partai berbasis ulama pada pemilu legislatif 2014 di kecamatan peukan bada kabupaten Aceh Besar” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsyiah, Banda Aceh, 2018.

<sup>12</sup> Muh.Ikramullah, “Kekalahan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Aceh pada Pemilu legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014”. *JIM FISIP Unsyiah* : AGB, Vol. 2 . No.3, Agustus 2017:1-19

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Landasan Teoritis dan Konsep**

Landasan teoritis sebagai literatur karya ilmiah disebut juga sebagai tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, maka akan mempermudah memecahkan masalah yang dikaji, serta terlihat kerangka pemikiran dari penelitian ini. Untuk mendukung peneliti dan menyelesaikan penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teori. Yaitu pengertian Partai Politik dan Partai Politik Lokal, konsep Perilaku Pemilih, Strategi Politik, dan Konflik Elit sebagai pisau analisa yang akan mengupas penelitian ini.

#### **2.1. Pengertian Partai Politik dan Partai Politik Lokal**

##### **2.1.1. Pengertian partai politik**

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum partai politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional, menjaga, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

rakyat Indonesia Secara lebih spesifik Partai Politik bertujuan meningkatkan partisipasi, keterlibatan anggota partai dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.<sup>13</sup>

Dalam kajian mengenai partai politik, ada tiga teori yang berusaha menjelaskan latar belakang kemunculan partai politik. *Pertama* teori kelembagaan. *Kedua* teori situasi historik. *ketiga*, teori pembangunan. Teori kelembagaan menjelaskan yang bahwasanya partai politik dibentuk oleh kalangan eksekutif dan legislatif atas dasar kebutuhan parlemen untuk membangun hubungan dan meminta dukungan dari masyarakat. Hal tersebut kemudian yang mendorong masyarakat juga mendirikan partai politik. Teori kedua menjelaskan sistem politik yang kacau dan masa-masa peralihan yang disebabkan oleh pergeseran masyarakat dari masyarakat tradisional yang hidup sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur lebih kompleks.

Teori yang ketiga menjelaskan yang bahwasanya partai politik disebabkan karena modernisasi ekonomi, peningkatan pendidikan, terbentuknya berbagai macam kelompok kepentingan dan organisasi profesi dan meningkatnya kemampuan individu masyarakat. Sehingga perkumpulan tersebut membutuhkan satu wadah yang bisa menampung dan memperjuangkan berbagai macam aspirasi<sup>14</sup>. Partai politik adalah organisasi politik yang terorganisir dengan baik dengan orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah

---

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo, 1992 ), hal . 113.

memperoleh kekuasaan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan atau program yang mereka miliki.<sup>15</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan yang bahwasanya, secara umum ada tiga prinsip dasar dari partai politik. *Pertama*, Partai sebagai Koalisi yang didasari kehendak untuk membangun kekuatan mayoritas dengan menggabungkan beberapa kepentingan. *Kedua*, Partai sebagai organisasi, yang menghendaki organisasi politik yang bersifat jangka panjang, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, dan tetap eksis ditengah dinamisnya politik. *Ketiga*, partai sebagai pembuat kebijakan, yang memiliki kewenangan untuk mendukung atau tidak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kadernya yang menduduki jabatan publik. Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, pencipta iklim yang kondusif, penyalur aspirasi politik, sarana meningkatkan partisipasi politik, dan Rekrutmen politik dalm proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.<sup>16</sup>

### 2.1.2. Pengertian partai politik lokal

Partai Politik lokal adalah organisai politik yang jaringannya terbatas, pada suatu daerah atau beberapa daerah (Provinsi atau Negara bagian), akan tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional). Partai politik lokal didirikan didirikan dan berbasis di daerah, serta bekerja dan memperjuangkan kepentingan daerah. partai politik lokal dapat dibagi kedalam dua sistem. *Pertama*, sistem partai politik lokal yang tertutup, dimana partai politik lokal hanya boleh berpartisipasi dalam

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta:Gramedia, 2008), hal. 404.

<sup>16</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 209-214.

pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah. *kedua*, sistem partai politik yang terbuka. Dimana partai lokal juga diberikan hak berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, dalam sistem terbuka ini, partai lokal dapat mitra koalisis partai nasional di tingkat nasional. Partai politik lokal telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, partai buruh di Inggris didirikan pada tahun 1900.

Fungsi yang melekat pada partai lokal juga sama dengan fungsi partai nasional. Hanya saja, jika partai nasional melakukan rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan politik untuk level nasional serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional. Maka, partai politik lokal melakukan hal yang sama untuk skala lokal. Meski dalam beberapa hal partai lokal harus bekerjasama dengan partai nasional untuk memperjuangkan kepentingan lokal. Beberapa Negara di di dunia membolehkan adanya partai politik lokal. Seperti Inggris, Spanyol, Kanada, Finlandia, India, dan Malaysia.

Adapun Tujuan partai lokal dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama* Hak Minoritas, partai politik lokal didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. *Kedua* partai politik lokal yang menginginkan memperoleh otonomi untuk daerahnya, atau meningkatkan dan menegakkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. *Ketiga*, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan daerahnya dengan membentuk negara baru<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hal. 31-66

Akan tetapi poin isi sudah dikunci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.<sup>18</sup>

### 2.1.3. Partai politik lokal di Aceh

Dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia yang berlangsung di Helsinki, perdebatan dan negosiasi kekhususan Aceh di bidang ekonomi dan sosial budaya tidak begitu sengit, akan tetapi tidak demikian untuk bidang politik. terjadi perdebatan yang sengit, karena isu yang di angkat sangat berat dan krusial, yaitu mengenai partai politik lokal. Penasehat GAM menyatakan tuntutan pembentukan partai lokal harus dipenuhi oleh pemerintah pusat jika menginginkan perundingan berhasil, hal ini dikarenakan jika kesepakatan damai disetujui sangat sulit bagi GAM untuk diwakili oleh partai-partai yang berpusat di Jakarta. GAM beranggapan partai nasional tidak mampu dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh.

Sikap keras GAM dalam menuntut partai politik lokal dilatarbelakangi oleh dua sebab. *Pertama*, anggapan Aceh memiliki perbedaan sejarah, kultural, dan identitas yang berbeda dengan Indonesia. Sehingga dibutuhkan adanya partai lokal sebagai sarana berekspresi. *Kedua* GAM sudah mengetahui dalam perundingan tidak ada pembicaraan mengenai kemerdekaan Aceh, sehingga GAM menginginkan pembentukan partai politik lokal sebagai Konsesi. Pada awalnya pemerintah Indonesia keberatan dengan usulan pembentukan partai politik lokal

---

<sup>18</sup>Muhammad Ridwansyah, *Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh*, Juni 2018, <http://vivajustica.law.ugm.ac.id/20018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/> ( di akses pada tanggal 16 Mei 2019

di Aceh. Ide partai lokal menjadi pilihan sulit bagi perunding pemerintah Indonesia.

Terjadi perdebatan yang sengit antara delegasi perunding pemerintah Indonesia dengan delegasi perunding Gam. Karena Gam tetap bersikeras memerlukan partai politik lokal untuk kendaraan politik, dan delegasi Indonesia tetap tidak menyetujui partai politik lokal dengan alasan dalam Konstitusi Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur masalah partai politik lokal. Akan tetapi untuk menghindari jalan buntu dan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Aceh secara soft power melalui dialog dan perundingan. Akhirnya kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan. Yaitu Aceh boleh mendirikan partai lokal, tetapi tetap dalam naungan NKRI.<sup>19</sup>

Tercapainya kesepakatan damai dalam lima tahap perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki merupakan berkah dari musibah gelombang tsunami akhir tahun 2004<sup>20</sup>. Memorandum of Understanding Helsinki atau yang kemudian disingkat dengan MoU Helsinki. akhirnya menyudahi konflik bersenjata, yang sudah berlangsung puluhan tahun, dimana dalam perundingan-perundingan sebelumnya selalu menemui jalan buntu. Dalam nota kesepahaman tersebut, salah satu poin yang disepakati adalah tentang partai politik lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>19</sup>Darmansyah Djumala, *Soft Power untuk Aceh*, hal. 156-162.

<sup>20</sup>Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, AL-Lubb, Vol. 1, No. 1. 2016 : 134-161

daerah. Dan itu juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam memahami aspirasi masyarakat Aceh.<sup>21</sup>

## 2.2. Strategi Politik

Strategi merupakan salah satu konsep yang berasal dari dunia militer, pertimbangan-pertimbangan strategis berperan sangat penting dalam pengelolaan massa dalam jumlah banyak. Von Clausewitz menyatakan tujuan utama strategi bukan hanya untuk meraih kemenangan dipermukaan semata-mata, akan tetapi juga untuk menciptakan kedamaian yang berada dibelakangnya. Strategi selalu memiliki fokus tujuan tertentu. Dan dalam konteks politik, tujuannya adalah memenangkan pemilu. Strategi politik adalah segala cara yang dipakai untuk mencapai tujuan politik, sebagai contoh strategi kampanye adalah salah satu bentuk khusus dari strategi politik.

Dapat di simpulkan yang bahwasanya Strategi adalah suatu ilmu tentang teknik atau taktik berupa tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis dan terkonsep dengan baik, atau suatu cara atau kiat muslihat berupa upaya-upaya untuk mencapai target yang diinginkan<sup>22</sup>. Politik adalah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu<sup>23</sup>. Jadi, strategi politik adalah pengetahuan tentang teknik,

---

<sup>21</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), hal. 8.

<sup>22</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya : Gitamedia Press, 2006), hal 448

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Widisuasarana, 1992), hal 10.

taktik, cara, kiat yang di jalankan oleh para politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama.

Memahami strategi politik adalah hal yang sangat penting. bukan hanya untuk partai politik, Organisasi non pemerintahan yang terlibat aktif dalam politik juga wajib memahaminya untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi. Strategi Kampanye adalah strategi khusus dari strategi politik yang bermaksud memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, supaya dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Peter Schrooder ada 10 sistematika konseptial yang harus dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. *Pertama* Merumuskan Misi, *Kedua* Penilaian situasional dan evaluasi, *ketiga* Perumusan Sub-Strategi, *keempat* Perumusan Sasaran, *kelima* menentukan target image, *keenam* menentukan kelompok-kelompok target, *ketujuh* pesan kelompok target, *kedelapan* menyusun instrumen-instrumen strategi, *kesembilan* implementasi strategi, *kese puluh* pengendalian strategi.

### **2.2.1. Jenis Strategi Politik**

Strategi-strategi politik yang diperkenalkan oleh Peter Schrooder berkaitan erat dengan kondisi teknis di lapangan dimana setiap politisi maupun organisasi memiliki kemungkinan untuk bekerjasama dengan pihak lain. Adapun strategi-

---

<sup>24</sup> Peter Schroder, *Politische Strategien/Strategi Politik* (terj. Aviantie Agoesman), (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-Fuer-Die-Freiheit, Indonesia, 2013), hal. 2-9.

strategi yang diperkenalkan oleh Peter Schroeder adalah sebagai berikut: strategi defect, strategi cooperate, strategi random, Strategi per kind, strategi per nasty, strategi spite, Strategi soft majority, strategi tit for tat, strategi mistrust, strategi tit for tat, Strategi prober, strategi Pavlov<sup>25</sup>.

Untuk dapat memenangkan Pemilihan Legislatif. Pendekatan, strategi, dan Komunikasi politik yang baik mutlak harus dilakukan oleh partai politik dan politisi yang ingin mendapatkan simpati dan ingin dipilih oleh masyarakat dalam kontestasi pemilihan. Ada beberapa strategi politik yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam pemilu. *Pertama* Strategi penguatan, Penguatan hubungan dengan pemilih sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antara partai politik maupun kandidat dengan pemilih. Baik yang bersifat rasional maupun emosional, strategi penguatan juga dilakukan bertujuan untuk mencegah masuknya pengaruh pesaing kepada pemilih.

*Kedua* strategi menanamkan keyakinan Partai politik maupun kandidat harus mampu meyakinkan pemilih secara ideologis mereka memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Strategi menanamkan keyakinan lebih sesuai untuk diterapkan pada jenis pemilih yang non-partisipan karena jenis pemilih ini perlu diyakinkan bahwa secara problem-solving ataupun ideologis kontestan bersangkutan lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Dan *ketiga* strategi pengenalan Strategi ini penting dilakukan supaya pemilih yang merupakan pendukung partai politik lain tidak memberikan citra negatif terhadap kandidat atau partai, karena citra negatif

---

<sup>25</sup> Peter Schroeder, *Politische Strategien/Strategi Politik* (terj. Aviantie Agoesman), hal. 35-50

dapat mempengaruhi persepsi massa mengambang. Sehingga dengan strategi ini memberikan kesempatan yang leluasa untuk menarik massa mengambang yang belum menentukan pilihan politiknya<sup>26</sup>.

Strategi politik sangat penting dan mutlak harus dikuasai oleh para politisi yang ingin memperoleh kursi legislatif, untuk mendapatkan kursi legislatif maka setiap politisi harus mampu memikat hati pemilih untuk mendapatkan simpati atau pun dukungan. Oleh karena itu politisi harus memiliki beberapa modal utama. Modal dalam setiap kontestasi politik selain sangat ditentukan oleh kualitas kandidat, popularitas kandidat, kompetensi kandidat, kapabilitas kandidat, dan moralitas kandidat. juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pemilihan.

Menurut Pierre Bourdieu Ada tiga modal yang harus dimiliki oleh setiap politisi yang ingin meraih kemenangan dalam setiap pemilihan, yaitu Modal Politik, Modal Sosial, dan modal ekonomi.. Di dalam pemilihan legislatif sebagai arena kontestasi politik dengan banyaknya pilihan kandidat dan partai politik. Maka partai politik ataupun kandidat yang memiliki peluang paling besar adalah yang memiliki tiga modal tadi, Semakin kandidat mampu memaksimalkan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Maka semakin besar peluang terpilih.

peluang terpilih setiap kandidat merupakan bagian dari akumulasi modal dan proses yang kompleks, tidak bisa dikatakan kandidat terpilih karena faktor modal tertentu. Modal politik adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap

---

<sup>26</sup> Firmanzah, *Marketing Politik-antara pemahaman dan realitas*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 109-111.

kandidat yang ingin menduduki kursi legislatif di Indonesia, baik DPR-RI, DPRA, dan DPRK.

Menurut Casey modal politik adalah pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang politisi atau partai politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi politisi atau partai politik bersangkutan, secara lebih rinci Casey menjelaskan adanya empat pasar politik yang memiliki pengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang politisi atau partai politik. yaitu Pemilu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik, dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik, dan pendapat/pandangan umum dari masyarakat mengenai politisi atau partai politik tersebut.

Modal Sosial Adalah modal yang terbangun dari interaksi sosial kandidat dengan lingkungannya, modal sosial erat kaitannya dengan tingkat ketokohan yang melekat pada diri seseorang sebagai penghargaan dari masyarakat. Modal sosial bisa berasal dari latar belakang sosial yang dimiliki oleh seseorang seperti pendidikan, pekerjaan, nama besar keluarga, dan ketokohnya di dalam lingkungan masyarakat (Tokoh Agama, Adat, Kepemudaan, dan lain sebagainya). Modal sosial begitu sangat penting bagi setiap politisi karena berkaitan dengan kepercayaan dan akses membangun relasi.

Menurut Robert Putnam modal sosial adalah hubungan yang didasarkan atas dasar saling percaya antara anggota masyarakat terhadap pemimpin atau terhadap tokoh masyarakatnya, modal sosial diartikan sebagai institusi sosial yang

melibatkan jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang mendorong lahirnya kerjasama dan kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.. modal ekonomi berperan penting sebagai penggerak. dalam musim kampanye kandidat harus mencetak poster, spanduk, membayar iklan dan berbagai kebutuhan lainnya.<sup>27</sup>

### 2.3. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih adalah sikap atau tindakan seseorang dalam menentukan pilihan terhadap sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap paling sesuai dengan dirinya. Menurut Malik dalam penelitiannya pemilih di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi tiga jenis. *Pertama* pemilih emosional adalah pemilih yang memiliki hubungan emosional sangat kuat dengan identitas yang membentuk dirinya sejak lahir, identitas itu bisa berbentuk paham agama, ideologis, dan budaya, *kedua* pemilih rasional-emosional adalah tipe pemilih yang memiliki kemampuan untuk merasionalkan pilihannya ketika menyangkut persoalan ideologis, agama, budaya, dan etnis. Mereka adalah pemilih yang lebih pasif dan lebih suka mengamati situasi dan kondisi. *Ketiga* pemilih rasional adalah pemilih yang mengesampingkan faktor emosional dalam proses menjatuhkan pilihan politiknya, pemilih rasional lebih mengedepankan analisa secara objektif keuntungan untuk dirinya ketika membuat satu keputusan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Stella Maria Ignasia Pantouw, Modalitas Dalam Kontestasi Politik, Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

<sup>28</sup>[https://kumparan.com/asmiati\\_malik/mengenal-tiga-jenis-pemilih-di-indonesia-1542537269488887454/full](https://kumparan.com/asmiati_malik/mengenal-tiga-jenis-pemilih-di-indonesia-1542537269488887454/full) (di akses pada tanggal 20 November 2019)

Secara umum menurut teori Denis Kavanagh, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam melihat perilaku pemilih (voting behavior), yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional.

### **2.3.1 Model Sosiologis**

Analisis sosiologis dikenal juga dengan sebutan Mazhab Columbia, karena dikembangkan oleh Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet yang berasal Columbia University. Adapun teori dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Dan hal tersebut juga berlaku dalam soal pemberian suara dalam pemilu. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial masyarakat dimana ia tinggal.

Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan sosiologi yaitu. status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal. Perilaku pemilih model sosiologis sering juga disebut dengan pemilih tradisional. dalam menentukan pilihan politiknya, sangat mengedepankan persamaan ideologi, asal-usul, nilai tradisional, budaya, dan agama. Pemilih tradisional tidak terlalu mempersoalkan rekam jejak, dan kebijakan partai politik.

Maupun solusi yang ditawarkan calon pejabat publik yang dipilihnya mengenai Kebijakan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan

pendidikan. Karena yang menjadi pertimbangan terpenting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah persamaan ideologi dan kedekatan sosial-budaya. Perilaku pemilih tradisional disebabkan oleh Rendahnya tingkat pendidikan, dan di Indonesia mayoritas pemilih memiliki karakteristik seperti ini.

### 2.3.2 Model Pilihan Rasional

Pemilih rasional memiliki orientasi para pembuat kebijakan harus mampu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pemilih rasional lebih mempertimbangkan kualitas dan kemampuan partai politik atau calon pejabat publik yang ditawarkan dalam visi misinya. Selain itu karakteristik pemilih rasional juga melihat kinerja partai di masa lalu dan gagasan-gagasan baru dalam menyelesaikan masalah di masa depan. Pemilih rasional tidak terlalu terikat dalam lingkaran ikatan ideologi, asal usul, nilai tradisional, budaya, dan agama dalam menentukan pilihannya. Analisis logis sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan pemilih rasional, sehingga pertimbangan dogmatis tidak terlalu mempengaruhi pemilih rasional. Karena yang paling penting bagi pemilih rasional adalah solusi kongkrit mengenai permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya, hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, dan disintegrasi nasional.<sup>29</sup>

Menurut teori rational choice yang dikemukakan oleh James Buchanan. ada prinsip dasar yang di anut oleh setiap pemilih rasional, yaitu prinsip dasar bahwa ketika seseorang melakukan pilihan pastilah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk dirinya, sebab pada dasarnya manusia ketika

---

<sup>29</sup> Firmanzah, *Marketing Politik-antara pemahaman dan realitas* hal. 109-124.

mengambil keputusan tertentu berangkat dari pertimbangan utama untuk memperjuangkan kepentingannya, tidak terkecuali ketika mengambil keputusan dalam kontestasi pemilihan umum<sup>30</sup>. Dalam konteks pemilu, pemilih rasional beranggapan arena pemilihan umum seperti sebuah pasar, dimana partai politik melakukan penawaran dan pemilih melakukan permintaan. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan. Pemilih rasional melakukan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih.<sup>31</sup>

#### 2.4. Teori Konflik Elite

Konflik berasal dari bahasa latin *conflictus* yang artinya pertentangan. pengertian konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda . Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil yang menimbulkan kecewaan. Konflik bisa terjadi antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama. konflik dapat artikan juga sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan.

Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain. *Pertama* menurut K.Lorenz Konflik merupakan suatu unsur sosial yang alami, *Kedua* Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara

<sup>30</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4454044/pilpres-dan-perilaku-pemilih> (di akses pada tanggal 14 November 2019)

<sup>31</sup> Haryanto, “Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia” . *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014, (291-308) ISSN 1410-4946

dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain. *Ketiga*, Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan. Untuk itu, di manapun manusia membentuk suatu ikatan sosial di situ akan terdapat konflik. *Keempat*, Dari sisi Marxisme, konflik di sebabkan oleh kepemilikan harta benda.

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sepanjang sejarah catatan kehidupan manusia sudah banyak terjadi konflik yang di akibatkan oleh Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi. Selama manusia masih hidup, konflik terus ada dan tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini, baik konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat. Konflik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat yang mencakup aspek yang kompleks. Konflik terjadi karena adanya pertentangan antara dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, ambisi dan nilai-nilai etika) yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok<sup>32</sup>.

Elit adalah sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menduduki kedudukan diatas kelompok lainnya. Elit dapat diartikan juga sebagai sekelompok orang yang terkemuka dan memiliki pengaruh kuat dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, baik memiliki kekuasaan ataupun tidak elit punya pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Pareto, setiap kelompok

---

<sup>32</sup> Raif Dahrendorf, lihat Peter Schroder dalam *Strategi politik*, Jakarta: Friedrich Naumannifung, 2003, hal.571.

masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kemampuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengelola kelompok masyarakat, Pareto berpendapat, masyarakat terdiri dari dua kelas: *Pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (Governing Elit) dan elit yang tidak memerintah ( Non Governing Elit) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. *Kedua*, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya.

Robert Putnam mengatakan bahwa ada lima aspek yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik yaitu. *Pertama*, kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan tidak merata. *Kedua*, pada hakikatnya orang dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya. *Ketiga*, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki Kekuasaan Pada Masyarakat. *Keempat*, elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, kemudian keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang terbatas. *Kelima*, kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom<sup>33</sup>. jadi dapat diartikan Konflik elit adalah benturan atau pertentangan kepentingan antar pihak yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam suatu organisasi, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil yang menimbulkan perselisihan.

---

<sup>33</sup>Khairul Amin, Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa , Jurnal Sosiologi USK Volume 11, Nomor 2, Desember 2017

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam sebuah penelitian ilmiah ada beberapa ciri-ciri keilmuan yang harus diperhatikan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk *deskriptif*, yaitu penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatar belakangi informan berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal.2-9

### 3.2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Alasannya karena di Kabupaten Aceh Barat Daya selama 2 kali pelaksanaan Pemilu Legislatif sebelumnya, yaitu pada tahun 2009 dan 2014 Partai Aceh selalu menjadi Pemenang dengan memperoleh suara tertinggi dan mendapatkan Posisi Ketua DPRK, akan tetapi pada Pemilu Legislatif 2019 perolehan kursi berkurang drastis dan suara partai secara keseluruhan juga menurun signifikan dengan menempati urutan ketiga sehingga kehilangan posisi Ketua DPRK.

### 3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitiannya dengan model kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat tertangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dari tujuan tersebut peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan tentang penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Aceh Barat Daya dalam Pemilu Legislatif tahun 2019.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, atau bisa diartikan cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi standar. Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, tanpa data tidak akan ada penelitian dan data dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang harus benar, jika diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah. Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data.

Kualitas instrument berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrument. Dan kualitas pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam mengumpul data. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*sekunder*). Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan Wawancara, studi dokumentasi. Dalam menyusun skripsi ini, penulis juga menggunakan metode penelitian perpustakaan, yaitu penelitian dengan menggunakan beberapa *literature* atau bahan perpustakaan lain yang mendukung penyusunan skripsi ini. Tidak hanya metode *library research* untuk mendapatkan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode *fieldresearch*, maka diperlukan teknik

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan kepada informan guna mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

Wawancara dilakukan dengan Ketua Umum atau pimpinan Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Ketua Umum atau Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Caleg Partai Aceh, pengamat atau akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Sayap Partai, dan perwakilan masyarakat selaku pemilih.

## **2.Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dalam penelitian ini pengumpulan data melalui dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian yang mendalam berkaitan dengan analisis penurunan perolehan kursi partai aceh pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Aceh Barat Daya, baik berbentuk tulisan, seperti buku, catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan. Berupa gambar, seperti foto, gambar hidup, dan sketsa. Atau berupa karya-karya monumental, seperti karya seni yang dapat berupa patung, dan film. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dokumentasi tentang berbagai teori dan pendapat yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### **3.5.Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan untuk mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam sehingga analisis data kualitatif bersifat induktif,yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika dibutuhkan.
2. Tahap penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk uraian singkat, seperti bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain-lain, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.
3. Tahap penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data dengan cara induktif, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada, temuan bisa berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas atau berupa hubungan interaktif, hipotesis, dan teori.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hal.224-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan yang diteliti, dimana hasil penelitian tersebut dianalisis secara sistematis sehingga memberikan kesimpulan penelitian yang tepat. Dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas mengenai data-data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Aceh Barat Daya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan peluang serta tantangan yang di hadapi oleh calon anggota legislatif dari Partai Aceh pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya

##### 4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pengamatan peneliti mengenai penurunan perolehan kursi Partai Aceh Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya.

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini resmi berdiri pada 10 April 2002, dimekarkan dari Kabupaten Aceh Selatan setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat

Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam gugusan pegunungan Bukit Barisan. Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Samudra Indonesia, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.

## **2. Jumlah Kecamatan, Mukim dan Gampong**

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 Kecamatan yaitu. Kecamatan Babahrot memiliki 1 mukim dan 14 gampong, Kecamatan Kuala Batee memiliki 3 mukim dan 21 gampong, Kecamatan Jeumpa memiliki 4 mukim dan 12 gampong, Kecamatan Susoh memiliki 4 mukim dan 29 gampong, Kecamatan Blangpidie memiliki 4 mukim dan 20 gampong, Kecamatan Setia memiliki 2 mukim 9 gampong, Kecamatan Tangan-Tangan memiliki 1 mukim dan 15 gampong, Kecamatan Manggeng memiliki 3 mukim dan 18 gampong, Kecamatan Lembah Sabil memiliki 3 mukim dan 14 gampong.

## **3. Jumlah Penduduk**

Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh suku Aceh sebanyak 80% dari jumlah penduduk, sisanya adalah suku anek jamee sebanyak 12% dan sebanyak 8% pendatang dari berbagai suku. Jumlah penduduk Aceh Barat Daya pada tahun 2017 berjumlah 148.687 jiwa dengan kepadatan penduduk 100 jiwa/km.

#### 4.1.2. Sejarah Berdirinya Partai Aceh

Pasca MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus Tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Salah satu isi Nota Kesepahaman tersebut memberikan kekhususan kepada Aceh yang tidak dimiliki oleh Provinsi lain di Indonesia, berupa ruang bagi masyarakat Aceh untuk mendirikan Partai Politik lokal sebagai wadah memperjuangkan aspirasi dan keterlibatan dalam pembangunan politik. Partai Aceh didirikan oleh eks kombatan Gam, kaum intelektual, serta berbagai kelompok masyarakat Aceh lainnya. Pada tanggal 4 Juni tahun 2007 partai Aceh berdiri di Banda Aceh dengan pendirinya Tgk. Yahya Mu'ad, Adnan Beurensyah, Tarmidi, Hasanuddin, Muhammad Yasir, Mewakili pendiri Partai Aceh.

Partai Aceh sebelumnya sudah berganti nama sebanyak tiga kali, pada awal pendiriannya bernama Partai GAM dan bendera yang digunakan serupa dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akan tetapi Indonesia menolak nama Partai GAM karena dianggap melanggar tiga regulasi sekaligus, yakni Mou Helsinki, Melanggar Undang-undang Pemerintahan Aceh dan melanggar undang-undang pendirian partai lokal yang harus tetap memperhatikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak boleh menggunakan lambang atau atribut GAM. Akhirnya pada 22 April 2008 pengurus partai mengganti nama dari Partai Gerakan Aceh Mandiri menjadi Partai Aceh. Dan pada tanggal 22 Mei 2008 terbitlah surat Keputusan Menkumham Wilayah Aceh Nomor W1-63.AH.11.01 Tahun 2008 tentang pengesahan pendaftaran Partai Aceh. Partai Aceh untuk kali

pertama dipimpin oleh Muzakkir Manaf sebagai Ketua Umum, Sekretaris Muhammad Yahya, SH, dan bendahara Hasanuddin.

#### **4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Partai Aceh**

##### **1. Visi Partai Aceh**

Visi Partai Aceh adalah membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas agustus dua ribu lima (15-08-2005) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

##### **2. Misi Partai Aceh**

Misi Partai Aceh Mentransformasi dan atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Develoment Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia.

##### **3. Tujuan Partai Aceh** A R - R A N I R Y

Partai Aceh bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama, dan Negara.
- b) Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandtangani oleh Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

- c) Mewujudkan Kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata baik secara materil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh
- d) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia<sup>36</sup>

## 4.2. Deskripsi Temuan Penelitian

### 4.2.1. Perolehan Suara dan Data Pemilih

Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya di ikuti oleh 16 partai politik dari 20 Partai Politik. Di mana empat diantaranya adalah partai lokal. yaitu PA, PNA, partai SIRA, dan partai PDA. Pemilih yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah 97.681 orang, hasilnya 11 partai politik menguasai 25 kursi DPRK dan lima partai politik gagal memperoleh kursi. Dengan rincian Demokrat, PNA, PA, PAN, Nasdem, dan Golkar masing-masing meraih tiga kursi. PKB, Gerindra, dan Hanura masing-masing memperoleh 2 kursi. Dan PKS serta PPP masing-masing memperoleh 1 kursi.

**Tabel 4.1. Perolehan suara Partai dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Nama Partai	Nomor Urut Partai	Perolehan Suara Sah	Urutan Suara Tertinggi
PKB	1	7,493	8
Gerindra	2	6,719	7

<sup>36</sup> *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh*

Golkar	4	5,281	6
NasDem	5	7,752	5
PKS	8	3,436	10
PPP	10	3,166	11
PAN	12	8,078	4
Hanura	13	4,204	9
Demokrat	14	14,161	1
PA	15	9,372	3
PNA	18	9,709	2

**Sumber : Diolah dari data KIP Kabupaten Aceh Barat Daya**

Adapun data rincian perolehan suara partai Aceh dan perolehan kursi di setiap daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Perolehan suara Partai Aceh dari tiap Dapil dan Perolehan Kursi pada Pemilu Legislatif 2019**

Daerah Pemilihan (Dapil)	Kecamatan	Perolehan Kursi	Jumlah Suara sah Partai dan Caleg
1	Blangpidie, Susoh, Jeumpa	1	2,612
2	Setia, Tangan-tangan, Manggeng, Lembah Sabil	1	3,581
3	Kuala Batee, Babahrot	1	3,179
Jumlah Total Suara			9,372

**Sumber : Diolah dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya**

Lima partai politik yang gagal memperoleh kursi adalah PBB, SIRA, PDA, Garuda, dan PSI. Dari penjelasan diatas jelas terlihat perolehan total suara Partai Aceh pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh

Barat Daya berada pada urutan ketiga setelah Partai Demokrat dan Partai PNA. penurunan perolehan suara partai yang berimbas pada menurunnya perolehan kursi Partai Aceh merata terjadi di ketiga daerah pemilihan. Dimana tiap daerah pemilihan hanya memperoleh satu kursi saja. Padahal pada pemilu legislatif tahun 2009 dari Daerah Pemilihan I (Blangpidie, Susoh, Jeumpa) berhasil meraih tiga kursi dan kembali meraih tiga kursi pada pemilihan legislatif tahun 2014.

Sedangkan di daerah Pemilihan II (Setia, Tangan-tangan, Manggeng, Lembah Sabil) pada pemilu legislatif tahun 2009 berhasil meraih tiga kursi dan pada pemilu legislatif tahun 2014 meraih dua kursi. Begitu juga dengan daerah pemilihan III (Kuala Batee-Babahrot) pada pemilu legislatif tahun 2009 meraih tiga kursi dan pada pemilu legislatif tahun 2014 meraih dua kursi.

Anggota Legislatif yang terpilih juga tidak ada satu pun yang petahana, ketiganya merupakan wajah-wajah baru.. Jika dilihat dari suara badan yang diraih oleh anggota legislatif yang terpilih, Dina Afridha, S.Pd menduduki urutan ke sembilan dari 10 kursi yang tersedia di daerah pemilihan I, sedangkan Sardiman menduduki urutan ke tujuh dari delapan kursi yang tersedia di daerah pemilihan II, dan Hendra Fadhli,SH menduduki urutan ke lima dari tujuh kursi yang tersedia di daerah pemilihan III.

Artinya anggota legislatif yang terpilih dari Partai Aceh memperoleh suara badan yang rendah dan dibawah rata-rata anggota legislatif yang terpilih dari partai lain. Adapun calon anggota legislatif terpilih dari Partai Aceh di setiap daerah pemilihan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Daftar Calon Anggota Legislatif Terpilih Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019**

Daerah Pemilihan (Dapil)	Nama Calon Terpilih	Nomor Urut	Jumlah Suara Sah
1	Dina Afridha, S.Pd	7	520
2	Sardiman	1	840
3	Hendra Fadli, SH	1	809

(Sumber: KIP Aceh Barat Daya, 2019)

Penurunan perolehan suara dan kursi partai Aceh terjadi dari setiap periode pemilihan, meskipun daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan. dalam tiga kali ke ikutsertaan Partai Aceh di Pemilu Legislatif, suara dan perolehan kursi partai aceh mengalami penurunan yang sangat drastis, jika dibandingkan antara tahun 2009 dan 2019. Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya kehilangan 50% lebih suara ideologis partai.

Perolehan Kursi Partai Aceh mengalami penurunan dari 9 kursi pada tahun 2009, menjadi 7 Kursi pada tahun 2014, dan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya hanya bisa mempertahankan 3 kursi pada tahun 2019. Dan yang paling mengejutkan suara total partai aceh juga turun ke urutan ketiga, sehingga partai aceh harus rela kehilangan posisi ketua DPRK, padahal pada pemilihan legislatif tahun 2009 dan tahun 2014 Partai Aceh menduduki posisi ketua DPRK Aceh Barat Daya. Penurunan ini tentunya terjadi bukan tanpa alasan, ketidakmampuan Partai Aceh menjaga basis pemilih ideologis adalah penyebabnya. Di samping tidak mampu menciptakan basis atau merekrut pemilih baru.

### **4.3. Pembahasan**

#### **Penyebab menurunnya suara Partai Aceh pada Pemilu Legislatif**

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya perolehan kursi Partai Aceh pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan menyimpulkan beberapa penyebab utama berkurangnya perolehan kursi partai Aceh di Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

##### **4.3.1. Perpecahan elit Partai Aceh**

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai adalah permasalahan yang kompleks, naik dan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai adalah hal yang lazim terjadi dan tidak dapat untuk dihindari, Setiap Partai Politik akan mengalami siklus tersebut, penurunan kepercayaan disebabkan oleh banyak faktor. salah satunya adalah faktor perilaku elit partai, perilaku elit secara tidak langsung menggambarkan bagaimana kondisi suatu partai, jika perilaku elitnya baik maka citra partai akan baik di mata masyarakat, dan begitu juga sebaliknya, hal ini dikarenakan elit adalah motor penggerak partai. Jika motor penggerak partai terlibat konflik maka otomatis kondisi partai akan kacau.

Hal ini selaras dengan penjelasan dari teori elit yang dikemukakan oleh Pareto yang bahwasanya setiap kelompok masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kemampuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengelola kelompok masyarakat. Artinya elit politik adalah mereka yang memiliki sumber kekuasaan politik sedangkan jumlah yang memiliki sumber

kekuasaan politik dengan jumlah anggota suatu kelompok tidak sebanding. Perpecahan yang terjadi antar elit Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya berawal dari proses Pilkada tahun 2017 menyebabkan kekuatan Partai Aceh menjadi melemah sehingga mempengaruhi konsentrasi dan persiapan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif tahun 2019.

Elit Partai Aceh memiliki sifat yang tertutup yakni tidak menerima kritikan dan saran dari orang lain yang bukan berasal dari kelompoknya maupun orang yang bukan termasuk dalam lingkungannya. Sehingga tak jarang dalam proses pengambilan keputusan elit yang bersifat konservatif tidak mendengarkan aspirasi anggotanya<sup>37</sup>. Hal ini juga sesuai dengan temuan peneliti dilapangan berdasarkan wawancara dengan Akademisi dari Kampus STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya.

“Perpecahan elit Partai Aceh bermula pada prosesi Pilkada 2017. di internal PA/KPA Aceh Barat Daya adanya silang pendapat dalam pengusungan dan penetapan calon Bupati pada Pilkada 2017, sebagian pengurus PA/KPA tidak sepakat mengusung Erwanto sebagai calon Bupati karena tidak berdasarkan kesepakatan bersama, perpecahan juga terjadi antara Jufri Hasanuddin dan Erwanto , sebelumnya mereka merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya periode 2012-2017 yang di usung oleh Partai Aceh. Pada pemilihan kepala daerah 2017 Erwanto mencalonkan diri sebagai Bupati periode 2017-2022, sedangkan Jufri Hasanudin tidak mencalonkan diri akan tetapi yang bersangkutan tidak mendukung calon yang di usung oleh partai aceh, dan mendukung salah satu calon yang berasal dari jalur independen.”<sup>38</sup>

Adapun elit Partai Aceh yang saat itu tidak setuju dengan penetapan Erwanto sebagai Calon Bupati diantaranya adalah juru bicara KPA wilayah 13

---

<sup>37</sup> Trisna Winda, *Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Elit Politik Partai Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 1: 1-12 Februari 2019 [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP)

<sup>38</sup> Wawancara dengan Afdhal Jihad, S.Ag. PLT Ketua STKIP Muhammadiyah Abdy dan mantan anggota DPRK Abdy, Wawancara 24 Juli 2019

Blangpidie, Wakil Ketua dan Bendahara DPW PA Abdya, Perwakilan Pengurus Sagoe, Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh, Perwakilan KPA Sagoe, Ghazi KPA Wilayah/DPW PA, dan Pangda III. Penolakan ini dikarenakan penetapan Erwanto sebagai Calon Bupati yang diusung oleh Partai Aceh tidak sesuai dengan AD/ART Partai, sehingga dianggap tidak sah karena tidak melalui proses musyawarah dengan seluruh Kader dan jajaran KPA/DPW PA Abdya serta sayap PA.

Penetapan Erwanto tidak melalui mekanisme seharusnya karena langsung ditetapkan oleh DPA PA<sup>39</sup>. sedangkan disisi yang lain ada beberapa Kader Partai Aceh juga sudah menyatakan kesiapan menjadi bakal calon Bupati maupun bakal calon wakil Bupati Aceh Barat Daya dengan memasang spanduk publikasi di beberapa tempat. yaitu Zainal Cot, Tgk Am Nasir, dan Muhammad Ansar. Akan tetapi DPA PA langsung memveto Erwanto sebagai Calon Bupati Aceh Barat Daya yang diusung oleh Partai Aceh. Hal tersebut yang membuat banyak Kader dan simpatisan Partai Aceh kecewa.

Kekecewaan ini bukan terjadi serta merta tanpa sebab, tidak meratanya pendistribusian kekuasaan antar elit menjadi penyebab utama. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robert Putnam yang mengatakan bahwa kekuasaan politik sama seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan tidak merata. sehingga ketika proses pendistribusian ini dilakukan dengan tidak merata akan menimbulkan kekecewaan dari pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya. Begitu halnya yang terjadi di internal

---

<sup>39</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2016/04/07/usung-erwanto-pakpa-abdya-terbelah> ( di akses pada tanggal 20 Juni 2020)

Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya dalam proses penetapan Calon Bupati pada Pilkada 2017, banyak pengurus merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga menimbulkan kekecewaan yang berujung terjadinya perselisihan yang tak kunjung usai.

Menjelang Pilkada 2017 di Internal Partai Aceh mengalami gejolak yang membuat kekuatan Partai Aceh terbelah, ada beberapa Kader Partai Aceh yang dilaporkan kepolisi oleh Ketua DPW PA/KPA Aceh Barat Daya karena menurunkan spanduk Erwanto-Muzakir Nd yang diusung oleh Partai Aceh sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati<sup>40</sup>. Tidak hanya sampai disitu Erwanto yang sudah ditetapkan oleh DPW Partai Aceh sebagai Calon Bupati Aceh Barat Daya juga melaporkan ke Polda Aceh beberapa anggota KPA Aceh Barat Daya karena dianggap merusak baliho pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati<sup>41</sup>. Pasca Pilkada 2017 dalam tubuh partai aceh terkooptasi, dan itu belum diselesaikan hingga pemilihan legislatif tahun 2019

“Konflik elit Partai Aceh membuat kami selaku mesin dan sayap partai tidak bisa bekerja secara maksimal dilapangan, intruksi dan komando di Partai Aceh terpecah sehingga membuat kader dan sayap partai kurang solid. ditambah lagi dengan rendahnya daya jual calon legislatif dari Partai Aceh yang di usung pada pemilihan legislatif tahun 2019 sehingga kader partai dan simpatisan kesulitan dalam meyakinkan pemilih. Partai Aceh pada pemilu legislatif tahun 2019 sangat kurang persiapan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif akibat konflik internal, sehingga kelemahan itu dimanfaatkan betul oleh Partai Nasional dan Partai Lokal lain sebagai pesaing, selain itu Partai Aceh juga masih terpaksa menggarap pemilih ideologis yang berasal dari keluarga dan simpatisan kombatan GAM, sehingga tidak menggarap

---

<sup>40</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2016/08/23/kpa-dan-pa-turunkan-baliho-erwanto> ( di akses pada tanggal 20 Juni 2020)

<sup>41</sup> <https://www.ajnn.net/news/erwanto-lapokan-anggota-kpa-ke-polisi-ketua-pa-abdaya-kesal/index.html> ( diakses pada tanggal 20 Juni 2020)

basis suara baru dari kalangan pemilih pemula atau yang biasa disebut pemilih milenial yang persentasenya semakin bertambah”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dampak dari konflik antar Elit Partai Aceh menyebabkan mesin-mesin Partai Aceh tidak dapat bekerja maksimal, simpatisan Partai kesulitan dalam meyakinkan masyarakat dengan kondisi elit politik yang bersebrangan pemikiran politik.

#### 4.3.2. Kekecewaan Masyarakat

Pada Tahun 2009 dan 2014 Masyarakat menaruh harapan yang begitu besar kepada Partai Aceh. masyarakat mendukung Partai Aceh karena dianggap bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur politik. Karenanya, masyarakat memberikan kesempatan kepada kader-kader Partai Aceh untuk membangun Aceh. Hanya saja, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak cita-cita perjuangan dan ekspektasi yang disematkan belum kunjung diwujudkan. Hal ini setidaknya membuat kepercayaan masyarakat kepada Partai Aceh secara perlahan mulai tergerus.

“sebagai masyarakat kami melihat Politisi dari Partai Aceh belum memiliki gebrakan dan terobosan dalam mensejahterkan masyarakat melalui peran dan fungsinya di parlemen, kami selaku masyarakat sudah punya pengalaman dalam dua kali pemilihan sebelumnya, dimana anggota legislatif dari Partai Aceh tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kursi DPRK, selain itu pada pemilihan legislatif tahun 2019 calon anggota legislatif dari Partai Aceh juga tidak memilik gagasan-gagasan yang bisa memberikan kami garansi tidak akan di kecewakan lagi seperti anggota legislatif periode sebelumnya”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sahal Tastariman, Ketua Pemuda Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya, 22 Juni 2020

<sup>43</sup> Wawancara dengan Wahyu Ramadhan, Masyarakat Dapil III, Wawancara 27 Juli 2020

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh menurun dikarenakan anggota legislatif dari Partai Aceh pada periode sebelumnya dianggap tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya, tanpa disadari hal tersebut melahirkan persepsi yang bahwasanya anggota legislatif dari partai lokal tidak berbeda dengan partai politik lain, cukup beralasan masyarakat mengalihkan dukungan dari partai Aceh pada Pemilu legislatif 2019. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu praktisi yang peneliti wawancarai..

“Penurunan perolehan kursi Partai Aceh hampir terjadi di semua daerah, akan tetapi untuk Abdyta mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap partai Aceh yang sudah dua kali pemilihan legislatif menjadi pemenang dianggap belum mampu menjawab ekspektasi masyarakat, selain itu masyarakat juga kecewa kepada anggota Dprk yang terpilih dari partai Aceh pada pemilihan legislatif sebelumnya dianggap tidak mampu memenuhi janji politiknya. Sehingga caleg dari partai Aceh pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 kewalahan dalam meyakinkan pemilih, karena tidak mampu memberikan garansi kepada pemilih ideologis. Selain itu perilaku pemilih ideologis Partai Aceh di Abdyta juga mengalami perubahan dengan semakin banyaknya pengalaman mengikuti Pemilu, sehingga banyak pemilih ideologis Partai Aceh yang mengalihkan dukungan politiknya kepada Partai Nanggroe Aceh yang dianggap juga partai lokal yang lahir dari rahim perjuangan yang sama”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan Kekecewaan masyarakat pada anggota legislatif dari Partai Aceh pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 membuat masyarakat menuntut adanya garansi lebih dari calon legislatif partai aceh, akibatnya masyarakat mulai lebih selektif dalam menentukan pilihan politiknya.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Herianto Marzuki S.Pd, Msi, Pengamat politik/praktisi , wawancara 04 Agustus 2019

### 4.3.3. Rendahnya Elektabilitas Calon Legislatif dari Partai Aceh

Elektabilitas adalah daya daya pikat, daya tarik, atau nilai jual yang dimiliki oleh seseorang sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menjatuhkan pilihannya. Menurut Dendy Sugiono elektabilitas adalah ketertarikan seseorang dalam memilih. Ditengah kondisi perpecahan elit Partai Aceh yang tak kunjung selesai dan mulai berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh. Elektabilitas dan modalitas yang dimiliki oleh calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya juga sangat rendah, padahal Masyarakat selain melihat partai pengusung juga melihat figur sosok atau ketokohan calon.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dalam bukunya *The Forms of Capital* yang menyatakan setiap calon pejabat publik harus memiliki tiga modal utama. Yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Calon anggota legislatif Partai Aceh hanya mengandalkan modal politik yaitu modal nama besar Partai Aceh, sedangkan Modal sosial di lingkungan masyarakat di daerah pemilihannya kurang, dan modal ekonomi untuk menunjang kelancaran proses kampanye juga kurang, padahal modal ekonomi adalah pendukung politisi dalam pemilihan legislatif karena berkaitan erat dengan pembiayaan segala keperluan kampanye supaya dapat menjalankan strategi dengan maksimal.

Selain itu beberapa kader potensial Partai Aceh Hijrah ke Partai Lokal yang lain, dan ada juga yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRA, seperti

Zaman Akli, S.Sos yang sebelumnya merupakan anggota DPRK Partai Aceh selama 2 periode dan merupakan Ketua DPRK Abdya Periode 2014-2019, dan disaat yang sama Partai Nanggroe Aceh hadir sebagai Partai Lokal yang membawa harapan baru. Partai Nanggroe Aceh sudah dua kali mengikuti pemilihan legislatif di Kabupaten Aceh Barat Daya , yaitu pada tahun 2014 dan 2019.

Pada pemilihan Legislatif tahun 2014, PNA hanya memperoleh satu kursi, dan Pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendapatkan tempat di hati masyarakat Aceh Barat, PNA mengalami kenaikan perolehan suara partai yang sangat drastis dari 3.176 suara menjadi 9.709, sehingga PNA meraih tiga kursi dan memperoleh suara total partai tertinggi kedua, serta berhak memperoleh posisi Wakil Ketua satu. Peningkatan perolehan kursi dan suara PNA berbarengan dengan menurunnya perolehan kursi dan suara Partai Aceh.

“pada pemilihan legislatif tahun 2019 banyak masyarakat yang sebelumnya merupakan simpatisan atau pemilih Partai Aceh mengalihkan dukungannya kepada Partai Nanggroe Aceh, alasannya karena beberapa calon legislatif yang di usung juga merupakan simpatisan atau mantan kombatan GAM, dan PNA juga dianggap berasal dari rahim perjuangan yang sama, dan pengurus partai di tingkat pusat juga banyak berasal dari kalangan elit GAM. perpindahan basis suara Partai Aceh kepartai lain dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya bisa dilihat dari meningkatnya perolehan kursi PNA dari yang sebelumnya hanya meraih 1 kursi, pada tahun 2019 meraih 3 kursi”<sup>45</sup>

Tentu saja itu terjadi bukan tanpa alasan. Tidak mampunya anggota legislatif dari Partai Aceh menjadi pembeda di Parlemen serta tidak mampu memenuhi harapan masyarakat dalam dua kali pemilihan legislatif sebelumnya,

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Nasruddin, Tokoh Pemuda Aceh Barat Daya, Wawancara 20 Juni 2020

menyebabkan masyarakat secara perlahan kehilangan kepercayaan dan akibatnya mengalihkan dukungan kepada Partai Lokal yang dianggap juga merupakan representasi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka.

“kami kewalahan dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih calon legislatif dari Partai Aceh karena beberapa elit Partai Aceh sudah hijrah ke Partai Nanggroe Aceh dan juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari partai besutan Irwandi Yusuf, disisi lain masyarakat menilai Partai Nanggroe Aceh dan Partai Aceh berasal dari rahim yang sama, yang membedakan adalah Partai Aceh sudah tiga kali diberikan kepercayaan oleh masyarakat pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan kepala daerah pada tahun 2012. Sedangkan dengan Partai Nanggroe Aceh masyarakat Aceh Barat Daya belum punya pengalaman yang tidak mengenakkan, disamping itu ada beberapa Kader potensial yang hijrah ke Partai Nasional dan Kader Potensial Partai Aceh mencalonkan diri sebagai anggota DPRA”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yang bahwasanya Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 tidak memiliki 3 modal utama seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdeu. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dilapangan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kamaruddin Abubakar atau yang lebih dikenal dengan Abu Razak (Sekretaris Jenderal DPA PA):

“harus diakui Partai Aceh mengalami penurunan perolehan kursi baik untuk tingkatan DPRA dan DPRK pada pemilihan legislatif tahun 2019. partai aceh mengalami penurunan perolehan kursi yang sangat drastis kecuali untuk wilayah Aceh Barat dan Sabang, adapun penyebabnya dikarenakan Caleg yang dicalonkan kurang berkualitas dan bukan merupakan kader potensial, selain itu ditambah dengan mulai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh karena masyarakat hari ini sudah mulai melihat kinerja dan kontribusi Partai Aceh dan anggota legislatif dari Partai Aceh, selain itu di beberapa Kabupaten/Kota kepala daerahnya bukan dari partai aceh sehingga tidak terlalu leluasa dalam memberdayakan masyarakat, dan langkah yang dilakukan dari DPA PA dan DPW PA akan melakukan evaluasi berkala untuk membenahi

<sup>46</sup> Wawancara dengan Safrida, Wakil Ketua Putroe Aceh, Aceh Barat Daya (26 Agustus 2019)

persoalan ini, karena menurut pantauan kami, pada Pemilihan Legislatif 2019 DPW tidak melakukan proses seleksi yang ketat dalam menetapkan calon anggota legislatif, sehingga caleg yang ditetapkan tidak memiliki nilai jual di masyarakat”<sup>47</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yang bahwasanya mengandalkan nama besar partai saja tidak cukup bila tidak ditunjang dengan nama baik, ketokohan dan pengaruh calon anggota legislatif di tengah masyarakat. Dan modal ekonomi untuk hal ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, tepatnya di Daerah Pemilihan I (Kecamatan Blangpidie, Sosoh, Jeumpa). Syarifudin yang merupakan anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2019-2024, periode sebelumnya tahun 2014-2019 merupakan anggota legislatif terpilih dari Partai Aceh.

Rendahnya elektabilitas, pengaruh dan ketokohan Calon Anggota Legislatif yang diusung dari Partai Aceh membuat masyarakat tetap memilih tokoh yang dianggap mampu menjadi wakil rakyat di parlemen meskipun sudah berpindah ke Partai Nasional. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dilapangan.

“kami melihat sosok Syarifudin sebelum menjadi anggota DPRK adalah sosok yang terbuka dengan siapapun, jiwa sosialnya juga tinggi dan selama ini dekat dengan masyarakat, kami selaku pemuda juga bisa mengadu banyak hal kepada beliau, selama menjabat sebagai Anggota DPRK Periode 2014-2019 Syarifudin juga mampu menjaga dan memberdayakan basis pemilihnya sehingga nama baiknya masih terjaga di tengah-tengah masyarakat, beliau sudah dianggap sebagai tokoh khususnya di Kecamatan Jeumpa, maka itu alasan kami masih mendukung beliau pada pemilihan legislatif tahun 2019 meskipun maju melalui Partai Demokrat, masyarakat di daerah pemilihan I tetap memberikan dukungan khususnya di Kecamatan Jeumpa”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Kamaruddin Abubakar, Sekretaris Jenderal DPA-PA (10 Juli 2020)

<sup>48</sup> Wawancara dengan Mazwan, S.P.d, Masyarakat Dapil I, Wawancara 29 Juni 2020

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yang bahwasanya faktor ketokohan masih mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih. Khususnya di Daerah Pemilihan I (Blangpidie, Susoh, Jeumpa) dimana Syarifuddin yang pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 merupakan anggota legislatif terpilih dari Partai Aceh masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat daerah pemilihan I meskipun mencalonkan diri melalui Partai Demokrat.

#### **4.4. Tantangan Calon Anggota Legislatif Partai Aceh**

Tantangan merupakan segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dalam hal Pemilihan Legislatif tahun 2019 tentunya setiap calon anggota legislatif yang bertarung memperebutkan 25 kursi DPRK Aceh Barat Daya menghadapi berbagai macam tantangan, baik itu dari internal Partai maupun dari Masyarakat, begitu juga dengan calon anggota Legislatif dari Partai Aceh menghadapi berbagai macam tantangan. dimana di Internal Partai Aceh sedang ada dinamika antar elit yang belum selesai dan sulitnya meyakinkan masyarakat yang sudah punya pengalaman mengikuti beberapa kali pemilihan.

##### **4.4.1. Perubahan Perilaku Pemilih**

Perubahan perilaku pemilih disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya disebabkan oleh semakin berpengalamannya masyarakat dalam mengikuti pemilu. Dimana dalam arus keterbukaan informasi publik masyarakat bisa menilai sendiri pejabat publik yang telah dipilih, jika pejabat yang dipilih di anggap tidak bisa menjawab harapan, tak jarang masyarakat memberikan hukuman dengan tidak memberikan lagi pilihannya. ketidakmampuan pejabat publik mewujudkan harapan

tak jarang mempengaruhi perilaku pemilih. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 masyarakat sudah mulai lebih rasional sebelum menentukan pilihannya dengan melihat rekam jejak calon, peran anggota legislatif di parlemen, dan kebijakan partai Aceh selama diberikan kepercayaan oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori rational choice atau pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Buchanan dimana pemilih rasional melakukan pilihan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk dirinya. Pemilih rasional beranggapan pejabat publik harus mampu menyelesaikan masalah. karena itu, pemilih rasional lebih mempertimbangkan kualitas dan kemampuan partai politik atau calon pejabat publik yang ditawarkan. Selain itu karakteristik pemilih rasional juga melihat kinerja partai di masa lalu dan gagasan-gagasan baru dalam menyelesaikan masalah di masa depan.

Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan perilaku pemilih Partai Aceh pada tahun 2009 dan 2014 yang masih bersifat tradisional dan lebih mengedepankan hubungan emosional dalam menentukan pilihannya, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malik yang bahwasanya pemilih emosional adalah pemilih yang memiliki hubungan emosional sangat kuat dengan identitas yang membentuk dirinya sejak lahir. dimana dalam menentukan pilihan politiknya sangat mengedepankan persamaan ideologi, asal-usul, nilai-nilai tradisional, budaya, agama, dan identitas lain yang memiliki kesamaan.

Hal tersebut diperkuat dengan temuan peneliti dilapangan, Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat Daya dan salah satu anggota DPRK yang terpilih. Hendra Fadhli S,H. Dalam wawancaranya mengatakan:

“Tantangan yang dihadapi oleh calon anggota legislatif dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019 di Aceh Barat Daya adalah ketidakmampuan calon legislatif dalam meyakinkan masyarakat, kampanye dialogis yang dilakukan masih mengusung materi-materi lama sehingga kurang menarik perhatian pemilih yang sudah lebih rasional, calon anggota legislatif juga tidak memiliki gagasan-gagasan baru membuat kampanye masih menggunakan cara-cara lama, sedangkan disisi lain masyarakat sudah punya pengalaman mengikuti beberapa kali Pemilihan. Selain itu pemilih juga membandingkan dengan dengan kinerja anggota legislatif dari partai aceh pada periode sebelumnya yang tidak mampu memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat”<sup>49</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yang bahwasanya masyarakat mulai membandingkan calon anggota legislatif Partai Aceh dengan Anggota Legislatif periode sebelumnya yang dianggap oleh masyarakat kurang berkontribusi, sehingga hal tersebut yang menyebabkan calon anggota legislatif dari Partai Aceh kesulitan dalam meyakinkan pemilih. Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Reza Mulyadi,S.Pd Calon Anggota Legislatif Nomor urut 08 dari Dapil 1 dalam wawancaranya mengatakan:

“Calon anggota Legislatif dari Partai Aceh dalam kontestasi Pemilu 2019 tidak terlalu leluasa dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya karena Kinerja anggota Legislatif dari Partai Aceh pada Periode sebelumnya menjadi tolak ukur dan dianggap oleh pemilih belum maksimal, selain itu Partai Aceh juga dijadikan lawan bersama oleh partai lain mengingat dalam dua kali perhelatan pemilihan legislatif Partai Aceh selalu keluar menjadi pemenang, sehingga loyalis dan basis suara Partai Aceh menjadi incaran dari Partai-partai lain. Partai Demokrat dan Partai Nanggroe Aceh selaku partai yang memperoleh suara partai tertinggi pertama dan kedua diuntungkan karena menjadi partai pengusung atau pemegang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, sehingga memiliki sumber daya dan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Hendra Fadhli, SH, Wakil Ketua DPW Partai Aceh Abdy dan anggota DPRK terpilih, Wawancara 29 Juli 2019)

kemampuan dalam memberdayakan konstituen. Selain itu masifnya money politik juga menyebabkan calon legislatif dari Partai Aceh kewalahan”<sup>50</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yang bahwasanya kinerja anggota Legislatif Partai Aceh periode sebelumnya menjadi tolak ukur masyarakat. Partai Aceh adalah pemenang dalam dua kali pelaksanaan pemilihan legislatif periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2014 sehingga calon anggota legislatif dari Partai Aceh mewarisi kekecewaan masyarakat terhadap anggota legislatif periode sebelumnya.

#### **4.4.2. Efek Konflik Internal Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya**

Perilaku Elit Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat daya yang belum menyelesaikan konflik internal dalam tubuh Partai Aceh secara tidak langsung membuat konsentrasi, waktu, pikiran, dan tenaga elit partai menjadi tidak fokus bekerja untuk kepentingan Partai. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dilapangan:

“perselisihan yang terjadi di tingkat elit Partai Aceh sangat menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga banyak momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan partai justru terabaikan begitu saja, di perparah dengan ego yang dimiliki masing-masing elit membuat kondisi ini berlarut-larut karena masing-masing mementingkan kepentingan politik pribadi maupun kepentingan politik kelompok, sehingga kepentingan partai tidak menjadi kepentingan bersama”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yang bahwasanya perselisihan elit menyebabkan pilihan politik masyarakat iku terbelah mengikuti

---

<sup>50</sup>Wawancara Dengan Reza Mulyadi,S.Pd, Calon Legislatif Partai Aceh, Wawancara 18 Juli 2019

<sup>51</sup>Wawancara via Whatshaap dengan Tgk Am Nasir, Mantan Ketua KPA Abdy, Wawancara 16 Juli 2020

elit yang berada dalam lingkaran sosial yang sama dengannya, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Paul F.Lazarsfeld dan rekan-rekan yang berasal Columbia University, yang menyatakan setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, lingkaran pertemananan, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya.

“penurunan perolehan kursi partai Aceh di Abdyia menurut hemat saya disebabkan karena perselisihan antara elit Partai Aceh di Abdyia pada Pilkada 2017 belum diselesaikan dengan baik oleh internal Partai Aceh, sehingga dalam proses penetapan calon anggota legislatif periode 2019 tidak melalui seleksi yang ketat. Sehingga calon legislatif yang dicalonkan terkesan asal ada, perselisihan yang di bawa keranah hukum ini juga membuat konflik ini semakin berlaut-larut”<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yang bahwasanya karakteristik elit Partai Aceh yang tidak bisa menyelesaikan perselisihan di internal partai secara tidak langsung mempengaruhi persepsi masyarakat di akar rumput serta membuat kekuatan Partai Aceh melemah dari dalam. Perbedaan pandangan politik tidak bisa disikapi secara dewasa membuat beberapa elit di pecat termasuk Ir.H.Jufri Hasanuddin Bupati Aceh Barat daya Periode 2012-2017, karena pada Pilkada tahun 2017 tidak mendukung calon bupati yang di calonkan oleh Partai Aceh dan lebih mendukung pasangan independen, perbedaan dukungan politik antar elit Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut menyebabkan pilihan masyarakat juga terbelah mengikuti elit-elit tertentu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Afdhal Jihad, S.Ag. PLT Ketua STKIP Muhammadiyah Abdyia dan mantan anggota DPRK Abdyia, Wawancara 24 Juli 2019

<sup>53</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2017/02/09/jufri-hasanuddin-dipecat-dari-pa> ( diakses pada tanggal 16 Juli 2020)

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan secara kajian teoritis dan penelitian yang telah dilakukan sehingga memperoleh data-data yang akurat secara langsung dari informan. Melalui pembahasan yang telah dibahas secara mendalam dan lengkap maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penurunan perolehan kursi Partai Aceh pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan oleh persoalan internal partai dan persoalan eksternal yang berasal dari masyarakat.
2. Penurunan Perolehan Kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Legislatif 2019 disebabkan oleh konflik internal Partai Aceh, yang menyebabkan beberapa elit dan kader Potensial Partai hijrah kepartai lain. akibatnya dukungan simpatisan terpecah di kalangan akar rumput mengikuti elit dan kader potensial tersebut. Selain itu ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji calon anggota legislatif dari Partai Aceh karena melihat kontribusi anggota legislatif dari Partai Aceh pada Periode sebelumnya membuat Perubahan Perilaku pemilih menjadi lebih rasional, hal ini karena sudah memiliki pengalaman beberapa kali mengikuti pemilihan sehingga masyarakat sudah memiliki tolak ukur dan mulai lebih mempertimbangkan aspek kinerja, Rendahnya Elektabilitas dan ketokohan calon Anggota Legislatif yang diusung oleh

Partai Aceh pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 mengakibatkan terjadinya perpindahan dukungan masyarakat dari Partai Aceh ke Partai lain.

3. Tantangan yang dihadapi oleh calon anggota legislatif dari Partai Aceh sangat kompleks, mengingat Partai Aceh adalah pemenang pemilihan legislatif dua periode sebelumnya, di samping itu Partai Aceh juga bukan Partai pemenang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sehingga tidak memiliki sumber daya yang berkecukupan dalam memberdayakan konstituen. Di tambah lagi dengan konflik antar elit partai yang belum diselesaikan dengan baik dan perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional membuat caleg partai aceh tidak bisa memberikan garansi kepada pemilih.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas telah dipaparkan hasil yang dicapai dan ditemukan dalam penelitian ini, maka dari itu terdapat beberapa kekurangan terkait permasalahan ini. Adapun saran yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada elit partai politik Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dapat menyelesaikan persoalan internal dengan mengedepankan asas kekeluargaan, dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
2. Diharapkan kepada Partai Aceh harus siap menjadi Partai yang lebih Modern dan tidak bersifat eksklusif, serta perilaku elitnya tidak Konservatif

dengan selalu mempertimbangkan aspirasi anggota dalam proses pengambilan keputusan selama aspirasi anggota tidak mengganggu kinerja dan target Partai.

3. diharapkan Partai Aceh harus menciptakan basis suara baru, khususnya dari kalangan pemilih pemula, hal ini dikarenakan pemilih pemula kurang digarap sedangkan jumlah pemilih pemula semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan rata-rata dari Pemilih pemula kurang mendapatkan sosialisasi tentang Partai yang lahir dari rahim perjuangan ini.
4. diharapkan Partai Aceh dapat berbenah. Politisi Partai Aceh harus lebih responsif dalam menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing, harus memiliki gagasan-gagasan baru dalam menjalankan amanah dari masyarakat di bidang eksekutif maupun legislatif.
5. diharapkan Partai Aceh harus meningkatkan peran dan fungsi kadernya di parlemen, melakukan proses kaderisasi dan pendidikan politik yang maksimal untuk setiap anggotanya, pola pengelolaan partai harus lebih modern dan terbuka dengan setiap kritikan dan masukan yang membangun, serta rutin melakukan evaluasi untuk menemukan solusi terbaik menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Ahmad Farhan Hamid. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan. 2008.
- Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006.
- Darmansjah Djumala. *Soft Power untuk Aceh : Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Deden Fatur Rahman, Wawan Sobari. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM Press. (2004).
- Firmanzah. *Marketing Politik-antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Ikhsan Darmawan . *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- Peter Schrodell. *Politische Strategien/Strategi Politik*, terj. Aviantie Agoesman. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-fuer-die-freiheit Indonesia.2013.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013.

### UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik lokal di Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### SKRIPSI/DISERTA/JURNAL

Dian Maulana, “ *Penyebab Menurunnya suara Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Banda Aceh*” (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsyiah, Banda Aceh, 2016.

Feisal Akbar, Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh, *JIM FISIP Unsyiah*, Volume 2, Nomor 2:230-247 Juli 2017

Haryanto, “Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, No 3, Maret 2014, 9291-308) ISSN 1410-4946

Mohd Tasar, Kekalahan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2014, *lentera*, Vol.15 No. 15. November 2015.

Muh.Ikramullah, “Kekalahan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Aceh: pada Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh Tahun 2014”. *JIM FISIP Unsyiah: AGB*, Vol. 2. No. 3, Agustus 2017:1-19

Raihan Yuranda, “ *Kekalahan Partai Damai Aceh sebagai Partai berbasis Ulama pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*: (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsyiah, Banda Aceh, 2018.

Syamsuddin Bahrum, *Dinamika Partai Politik Lokal*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *AL-Lubb*, Vol. 1, No, 1. 2016: 134-161

Stella Maria Ignasia Pantouw, *Modalitas Dalam Kontestasi Politik*, Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Trisna Winda, *Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Elit Politik Partai Aceh (Studi Kasus: Kekalahan Pasangan Erwantō-Muzakir Pada Pilkada Serentak Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017)* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 4, Nomor 1: 1-12 Februari 2019  
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

### WEBSITE/SUMBER LAINNYA

<https://www.acehtrend.com/2017/07/19-partai-gam-cikal-bakal-partai-aceh>  
diakses pada tanggal 15 Mei 2019.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/acehkini/senjakala/partai-aceh-IrQAivcmgb>, di akses pada tanggal 15 Mei 2019.

Muhammad Ridwansyah, *Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh*, Juni 2018. dari situs: <http://vivajustica.law.ugm.ac.id/2018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/> Di akses pada tanggal 16 Mei 2019

<https://aceh.tribunnews.com/2016/08/23/kpa-dan-pa-turunkan-baliho-erwanto> di akses pada tanggal 20 Juni 2020

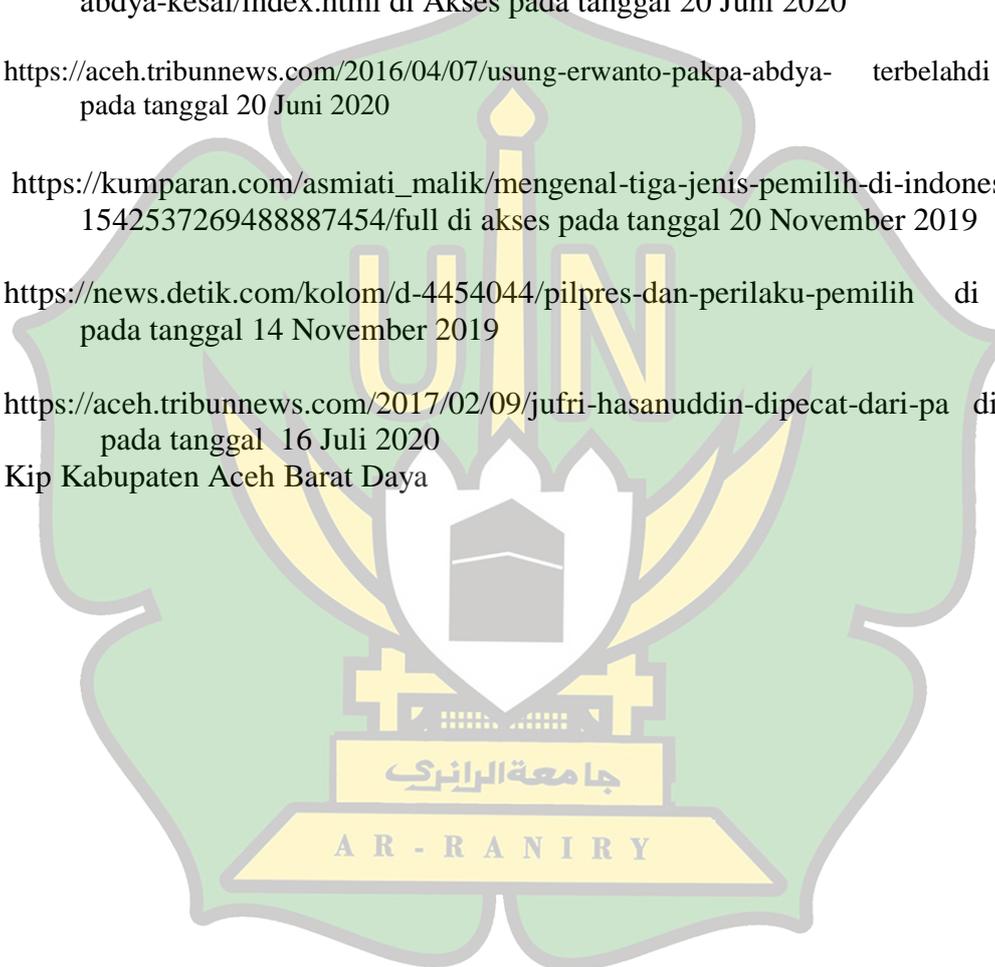
<https://www.ajnn.net/news/erwanto-lapokan-anggota-kpa-ke-polisi-ketua-pa-abdya-kesal/index.html> di Akses pada tanggal 20 Juni 2020

<https://aceh.tribunnews.com/2016/04/07/usung-erwanto-pakpa-abdya-terbelahdi> akses pada tanggal 20 Juni 2020

[https://kumparan.com/asmiati\\_malik/mengenal-tiga-jenis-pemilih-di-indonesia-1542537269488887454/full](https://kumparan.com/asmiati_malik/mengenal-tiga-jenis-pemilih-di-indonesia-1542537269488887454/full) di akses pada tanggal 20 November 2019

<https://news.detik.com/kolom/d-4454044/pilpres-dan-perilaku-pemilih> di akses pada tanggal 14 November 2019

<https://aceh.tribunnews.com/2017/02/09/jufri-hasanuddin-dipecat-dari-pa> diakses pada tanggal 16 Juli 2020  
Kip Kabupaten Aceh Barat Daya



## DOKUMENTASI





جامعة الرانري

AR-RANIRY

